

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo diukur berdasarkan **capaian kinerja** sasaran program dan kegiatan pembangunan, dimana pengukuran indikator kinerja meliputi **input, ouput, outcome, manfaat** dan **dampaknya** terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat selang tahun 2002 sampai dengan 2006. Dibawah ini akan diuraikan capaian kinerja dari aspek tersebut sebagai berikut.

#### A. Kinerja Program (Non Keuangan)

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo diperoleh setelah melalui rangkaian pengukuran yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Rekapitulasi capaian kinerja masing-masing sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2002 - 2006 disajikan dibawah ini.

#### 1. Capaian Kinerja Pembangunan

##### 1.1 Pengembangan Sumberdaya Manusia ( SDM )

Program peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Manusia telah ditetapkan sebagai program unggulan pertama pada Prioritas Pembangunan di Provinsi Gorontalo. Berbagai keberhasilan telah dicapai pada program ini dengan dimulainya dengan sasaran pendidikan berbasis kawasan yang fokus pada pendidikan pertanian dan perikanan. Capaian kinerja pengembangan SDM di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III-1 Matriks Capaian Kinerja Sasaran Program Pengembangan SDM Masyarakat Provinsi Gorontalo 2002 - 2006

SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (Tahun)				
		2002	2003	2004	2005	2006*
A. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM masyarakat	1. APK					
	- SD	111,65	112,71	102,01	104,86	105,86
	- SLTP	61,20	63,24	68,98	62,64	70,83
	- SLTA	34,57	35,50	55,09	40,56	47,67
	2. APM j					
	- SD	94,41	98,80	92,06	97,79	89,08
	- SLTP	38,24	44,47	44,36	48,73	55,42
	- SLTA	22,67	30,99	32,43	26,89	36,46
	3. Angka Melek Huruf	67,47	90,56	94,80	95,67	97,85
	4. APS					
	- SD	1,81	3,49	2,75	1,76	1,70
	- SLTP	6,69	1,43	1,31	2,20	2,12
	- SLTA	2,56	3,41	2,56	2,39	1,59
	5. Nilai Ujian Nasional					
	- SLTP	4,98,	5,04,	6,37,	6,12,	7,04,
	- SLTA					
	• IPA	4,78,	4,89,	6,06,	6,20,	7,53,
	• IPS	4,44,	4,58,	5,57,	5,54,	6,90,
	• Bahasa	4,42,	4,49,	5,65,	5,64,	6,76,
	- SMK	4,59	4,93	6,34	6,36	6,89

Sumber : Diknas Provinsi Gorontalo (2006)

\* Angka proyeksi

Sasaran pengembangan SDM melalui indikator sasaran APK dan APM mengindikasikan meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal ini ditandai dengan besaran Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK SD tahun 2002 sebesar 111,65 % pada tahun 2003 naik menjadi 112,71 %, pada tahun 2004

menjadi 102,01 %, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 104,86 %, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 105,86 %. APK SLTP tahun 2002 sebesar 61,20 % , tahun 2003 naik menjadi 63,24 %, pada tahun 2004 naik menjadi 68,98 %, selanjutnya tahun 2005 menjadi 62,64 %, sedangkan pada 2006 diperkirakan naik menjadi 70,83 %. Selanjutnya APK SLTA tahun 2002 sebesar 34,57 % , tahun 2003 naik menjadi 35,50 %, pada tahun 2004 naik menjadi 55,09 %, selanjutnya tahun 2005 menjadi 40,56 %, sedangkan pada 2006 diperkirakan naik menjadi 47,67 %. APM SD tahun 2002 sebesar 94,41 % , tahun 2003 naik menjadi 98,80 %, pada tahun 2004 menjadi 92,06 %, selanjutnya tahun 2005 naik menjadi 97,79 %, sedangkan pada 2006 diperkirakan menjadi 89,08 %. APM SLTP tahun 2002 sebesar 38,24 % , tahun 2003 naik menjadi 44,47 %, pada tahun 2004 menjadi 44,36 %, selanjutnya tahun 2005 naik menjadi 48,73 %, sedangkan pada 2006 diperkirakan naik menjadi 55,42 %. APM SD tahun 2002 sebesar 22,67 % , tahun 2003 naik menjadi 30,99 %, pada tahun 2004 naik menjadi 32,43 %, selanjutnya tahun 2005 menjadi 26,89 %, sedangkan pada 2006 diperkirakan naik menjadi 36,46 %. Meningkatnya nilai APK dan APM pada tahun 2002 - 2006 ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya infrastruktur pendidikan, perbaikan sistem pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Disamping itu juga capaian kinerja ini dihasilkan melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meningkatnya kualitas aparatur pengelola program pendidikan dan manajemen yang mampu mengatur dan mengendalikan program-program secara optimal

Sasaran pengembangan SDM melalui indikator sasaran meningkatnya angka melek huruf tahun 2002 sebesar 67,47 % pada tahun 2003 naik menjadi 90,56 %, pada tahun 2004 naik menjadi 94,80 %, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 95,67 %, sedangkan pada

tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 97,85 %. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan melalui Paket A, Paket B dan Paket C, dan peningkatan kesadaran baca tulis masyarakat.

Capaian kinerja sasaran pengembangan SDM melalui indikator sasaran angka putus sekolah jenjang pendidikan SD tahun 2002 sebesar 1,81 % pada tahun 2003 menjadi 3,49 %, pada tahun 2004 turun menjadi 2,75 %, selanjutnya pada tahun 2005 turun menjadi 1,76 %, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan turun menjadi 1,70 %. Selanjutnya angka putus sekolah jenjang pendidikan SLTP tahun 2002 sebesar 6,69 % , pada tahun 2003 turun menjadi 1,43 %, pada tahun 2004 turun menjadi 1,31 %, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 2,20 %, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan turun menjadi 2,12 %. Lebih lanjut angka putus sekolah jenjang pendidikan SLTA tahun 2002 sebesar 2,56 % pada tahun 2003 menjadi 3,41 %, pada tahun 2004 turun menjadi 2,56 %, selanjutnya pada tahun 2005 turun menjadi 2,39 %, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan turun menjadi 1,59 %. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan melalui bantuan beasiswa, pendidikan dasar 9 , dan pendidikan menengah, pembangunan infrastruktur pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran nilai ujian nasional jenjang pendidikan SLTP tahun 2002 capaiannya sebesar 4,98 pada tahun 2003 naik menjadi 5,04, pada tahun 2004 naik menjadi 6,37, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 6,12, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 7,04. Nilai ujian nasional jenjang pendidikan SLTA (IPA) tahun 2002 capaiannya sebesar 4,78, pada tahun 2003 naik menjadi 4,89, pada tahun 2004 naik menjadi 6,06, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 6,20, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 7,53. Nilai ujian nasional jenjang pendidikan SLTA (IPS)

tahun 2002 capaiannya sebesar 4,44, pada tahun 2003 naik menjadi 4,58, pada tahun 2004 naik menjadi 5,57, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 5,54, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 6,90. Nilai ujian nasional jenjang pendidikan SLTA (Bahasa) tahun 2002 capaiannya sebesar 4,42, pada tahun 2003 naik menjadi 4,49, pada tahun 2004 naik menjadi 5,65, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 5,64, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 6,76. Nilai ujian nasional jenjang pendidikan SMK tahun 2002 capaiannya sebesar 4,59, pada tahun 2003 naik menjadi 4,93, pada tahun 2004 naik menjadi 6,34, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 6,36, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 6,89. Meningkatnya capaian kinerja ini disebabkan dilaksanakannya diklat mata pelajaran ujian nasional, dan program teaching klinik serta beasiswa guru.

Namun kedepan pengembangan mutu pendidikan ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain buku dan alat pendidikan masih kurang, distribusi/penempatan tidak sesuai dengan kebutuhan serta kualitas guru yang belum memadai, demikian halnya perpustakaan dan laboratorium.

Keberhasilan didalam pencapaian indikator kinerja didalam mewujudkan pembangunan SDM Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut dicapai melalui berbagai langkah-langkah upaya strategis yang telah dilakukan antara lain :

- a. Pembangunan Pendidikan berbasis kawasan melalui penelitian dan pengembangan pembuatan master plan pendidikan berbasis kawasan bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Penuntasan wajib belajar Dikdas 9 tahun dan Perintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- c. Pengembangan kurikulum pendidikan dengan pendidikan berbasis kawasan.

- d. Pengembangan SMK berbasis kawasan dengan pendirian SMK Pertanian, Perikanan dan SMK
- e. Pembentukan Tim Pengembangan SDM Provinsi Gorontalo dengan sasaran pemberian bantuan beasiswa dan bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 di Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia. Lebih lanjut dalam menunjang kinerja pengembangan SDM, Balai Pengembangan Kegiatan menyusun dan model pembelajaran itu sendiri.

1. Pengembangan dan Ujicoba Model.

Pengembangan dan Ujicoba model dilaksanakan secara Berkelompok dan merupakan sarana untuk menyusun model pembelajaran itu sendiri.

- a. Pengembangan dan ujicoba model pendidikan Anak Usia Dini yang semula terkampus di BPKB dengan peserta didik 30 orang telah dapat dikembangkan di Desa Pilohayanga dengan peserta didik 30 orang, 14 orang telah menyelesaikan kegiatannya dan masuk ke jenjang sekolah dasar. Peserta didik yang baru masuk berjumlah 28 orang hingga saat ini jumlahnya bertambah menjadi 44 orang. Kelompok belajar rintisan berada di desa Toto kecamatan Kabila dengan peserta 40 orang.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Model usaha kerawang 20 orang, Agropolitan 20 orang, sistem penggemukan sapi 10 orang, budidaya ikan kerapu 10 orang, Tanaman semangka 15 orang, Daya Hias dan Usaha Ternak Ayam, Udang Windu

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Model keterampilan di bidang Konveksi 20 orang dan Tata Rias Kecantikan Kulit 25 orang telah mengikuti ujian lokal tingkat terampil dengan hasil kelulusan 100 %. Di bidang Kecantikan

Rambut 25 orang telah lulus ujian tingkat nasional dan seluruhnya lulus dengan nilai memuaskan. Pemnfaatan Green House sebagai media pembelajaran dan peningkatan sumber daya melalui pemagangan 6 orang dan 10 orang mengikuti kursus untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.

3. Pelestarian Kesenian Daerah telah di bina satu kelompok anak/remaja dengan kreasi baru yang dapat disajikan disaat penyambutan tamu.

Dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran pengembangan SDM, beberapa output yang terlahir dari pelaksanaan kegiatan program pengembangan SDM 2002 - 2006 ini antara lain tersedianya 17 ruang belajar dan 15 ruang laboratorium pada SMK, tersedianya sarana pendukung untuk 16 SMK dengan standar nasional dan internasional, terbangunnya gedung balai pusat bahasa, terlaksananya bantuan dana kepada 64 lembaga pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah disalurkan nya beasiswa kepada 496 Kelompok pembelajaran Paket A dan B guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9, magang bagi 60 guru di Industri dalam negeri, tersalurkan nya sebanyak 2250 buah kalender pendidikan ke sekolah-sekolah, terselenggaranya 10 Kelompok program paket B, terselenggaranya 11 kelompok program Paket C setara SMU, tersedianya 1250 Buku Modul Paket C setara SMU, terlaksananya 32 orang mengikuti Kemah Kesatuan Pemuda (KKP) di Jakarta, terlatihnya 75 Orang anggota kelompok usaha pemuda produktif (KUPP), terlatihnya 30 orang pemuda usia 15-35 tentang kepemimpinan siswa (LKS), terlatihnya 84 orang tenaga pendidik anak usia dini, tersedianya ijasah sebanyak 15.000 buah, terbinanya 100 orang atlit dan pembina olahraga pelajar melalui POPNAS, terlaksananya Haornas, Pordes dan Olahraga Cacat, terbinanya 42 Klub Olahraga Pelajar, terlaksananya kerjurnas PPLP, terbinanya 80 orang pelajar melalui Training Camp,

terseleggaranya pagelaran seni budaya daerah Gorontalo, tersedianya 100 orang guru mulok bahasa daerah Gorontalo, ditetapkannya Perda bahasa daerah Gorontalo, terpeliharanya benda-benda cagar budaya (BCB), terlatihnya 100 orang pemangku adat, terlatihnya sebanyak 60 orang tenaga keolahragaan.

Tabel III-2. Matriks Capaian Kinerja Sasaran Program Pengembangan SDM Aparatur Provinsi Gorontalo 2002 - 2006

SASARAN 1	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (Tahun)				
		2002	2003	2004	2005	2006*
B. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah.	1. Meningkatnya disiplin aparatur dari jumlah kehadiran	87 %	93 %	97,05 %	99,63 %	90 %
	2. Menurunnya hukuman disiplin aparatur	0 Orang	21 Org	38 Org	18 Org	0 Org

Sumber : BKD Diklat dan Banwas Provinsi Gorontalo (2006)

\* Angka sementara

Capaian kinerja sasaran program pengembangan SDM aparatur Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya disiplin aparatur yang diukur dari jumlah kehadiran tahun 2002 capaiannya sebesar 87 %, pada tahun 2003 naik menjadi 93 %, pada tahun 2004 naik menjadi 97,05 %, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 99,63 %, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan menjadi 90 %. Tingginya capaian kinerja ini akibat adanya pembinaan secara intensif yang dilakukan pimpinan di unit SKPD masing-masing dibarengi dengan adanya motivasi berupa reward bagi PNS yang sepantasnya mendapatkan penghargaan dan bagi yang tidak mentaati peraturan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,

Namun kedepan pengembangan SDM aparatur ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain minimnya sarana dan prasarana kerja, sistem informasi pegawai belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan, belum adanya peta pengembangan SDM aparatur, belum adanya standar kompetensi jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan, belum dilakukannya uji kompetensi bagi aparatur yang akan ditempatkan pada struktur organisasi.

Capaian kinerja sasaran program SDM aparatur Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran menurunnya hukuman disiplin pada Tahun 2002 tidak ada aparatur yang mendapatkan hukuman disiplin, pada tahun 2003 aparatur yang mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 21 orang, pada tahun 2004 aparatur yang mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 38 Orang, selanjutnya pada tahun 2005 turun menjadi 21 orang, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan semester 1 belum ditemukan adanya aparatur yang mendapatkan hukuman disiplin. Capaian kinerja ini akibat meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana dan pengelolaan sumberdaya aparatur, meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta optimalisasi sistem pengendalian internal di unit satuan kerja. Namun pengembangan SDM aparatur ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terdapatnya inefisiensi, mutu dan kualitas yang masih rendah, serta pelayanan lamban.

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran pengembangan SDM aparatur pemerintah beberapa output yang terlahir dari pelaksanaan kegiatan program pengembangan SDM aparatur tahun 2002 - 2006 ini antara lain terlaksananya 23 orang mengikuti Diklat PIM II di luar daerah dan Lemhanas 2 orang, terlaksananya 97 orang mengikuti Diklat PIM III, terlaksananya 160 orang mengikuti Diklat PIM IV, terlaksananya 559 orang mengikuti Diklat Prajabatan CPNSD, tersedianya 10 orang Widyaiswara yang terseleksi melalui calon

Widyaiswara, terlaksananya 275 orang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional diluar daerah, terlaksananya 47 orang mengikuti Diklat Kewidyaiswaraan TOT / TOC dan TOM, terseleksinya 64 Calon STPDN, terbantunya 218 orang PNS mengikuti Pendidikan Formal, terselenggaranya Seleksi 220 orang PNS untuk Diklat Prajab dan Teknis Fungsional, terlaksananya Studi Banding Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Struktural, terlaksananya 10 orang mengikuti Pelatihan Aplikasi Penerapan Simpeg dan Operator, terlaksananya 100 orang mengikuti Bimtek Tata Cara Penyelesaian Kasus dan Usul ke Bapek, terlaksananya 87 orang mengikuti Bimtek Penerapan Nilai Budaya Kerja, Terlaksananya 150 orang mengikuti Bimtek Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, terlaksananya 90 orang Camat mengikuti Dilklat, terlaksananya 330 orang mengikuti Workshop Mind Setting, terlaksananya 245 orang yang mengikuti Workshop Strategic Breakthrough, terlaksananya 65 orang Pejabat Eselon III yang mengikuti Workshop Standar Kompetensi Jabatan. Tersedianya 5 aparat pengawas dengan kompetensi yang memadai, terlaksananya peningkatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja sasaran program pengawasan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mendahulukan fungsi manajemen dan mengutamakan pemeriksaan preventif dan dan represif. Hal ini ditandai dengan menurunnya presentase temuan hasil pemeriksaan terhadap total APBD yang diperiksa pertahun.

Tahun 2002 temuan hasil pemeriksaan hanya 0,15% dari total APBD, tahun 2003 menjadi 0,19%, tahun 2004 menurun menjadi 0,13%, tahun 2005 menurun menjadi 0,06 % sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan akan menurun menjadi 0,05 %.

## 1.2 Pengembangan Pertanian Agropolitan

Pembangunan pertanian sejak periode 2002 hingga periode 2006 telah dilaksanakan beberapa program/kegiatan pokok yang meliputi : Pengembangan tanaman dan ketahanan pangan daerah, Pengembangan agropolitan jagung, Pengembangan agribisnis dan Pemberdayaan masyarakat pertanian.

Program pengembangan agropolitan merupakan salah satu program prioritas dengan entry point jagung sebagai komoditi andalan yang terus dikembangkan melalui peningkatan produksi, peningkatan produktivitas lahan serta peningkatan ekspor dan antar pulau jagung. Dengan capaian realisasi dapat digambarkan pada tabel 8 berikut ini :

Tabel III-3. Matriks Capaian Kinerja Sasaran Program Pengembangan Agropolitan Provinsi Gorontalo 2002 - 2006

SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (TAHUN)				
		2002	2003	2004	2005	2006*
A. Terwujudnya percepat-an pembangunan dan perekonomian daerah dengan memacu per-kembangan sektor pertanian.	1. Meningkatnya Jumlah produksi komoditas Jagung (Ton)	130.251	183.998	288.946	400.046	560.000
	2. Meningkatnya Jumlah produktifitas lahan Jagung (Ku/Ha)	28,49	31,34	34,64	37,13	37,67
	3. Meningkatnya Jumlah ekspor dan perdagangan antar pulau komoditas Jagung (Ton)	6.700	67.704	27.554	127.561	52.207**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (2006)

\* Proyeksi

\*\* Angka Sementara (Posisi Juni 2006)

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja sasaran program pengembangan Agropolitan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran

jumlah produksi komoditi jagung. Tingginya Capaian Kinerja ini disebabkan bekerjanya sistem dan manajemen pertanian yang memungkinkan terjadinya proses adopsi teknologi pengolahan pertanian di tingkat petani dapat diterima dengan baik, yang diikuti dengan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian. Jika dibandingkan dengan produksi Jagung 2004 sebesar 288.946,21 Ton maka produksi jagung pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 59,24 % dan pada posisi Juli 2006 produksi jagung sudah mencapai 316.639 Ton dengan produktivitas rata-rata 37,67 Ku/Ha. Peningkatan produksi jagung pada lima tahun terakhir ini disebabkan oleh adanya Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) serta adanya sentuhan teknologi kedalamnya seperti pemberian pupuk, penggunaan benih unggul, pengolahan lahan serta sistem budidaya yang baik dan didukung oleh kemampuan teknis petani yang terus meningkat.

Capaian kinerja jumlah produktivitas lahan jagung sebagai akibat oleh adanya upaya dari pemerintah dan para petani yang pada umumnya telah menggunakan varietas jagung komposit dan jagung hibrida yang diikuti dengan peningkatan kualitas SDM petani. Dengan demikian realisasi produktifitas lahan jagung di Provinsi Gorontalo mencapai 37,13 ku/ha atau mengalami kenaikan sebesar 7,19 % dibandingkan dengan produktifitas lahan jagung pada 2004 yang hanya sebesar 34,64 Ku/Ha. Produktivitas Provinsi Gorontalo tahun 2005 di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 34,54 ku/ha

Tingginya capaian kinerja sasaran pengembangan Agropolitan melalui indikator sasaran meningkatnya jumlah ekspor dan perdagangan antar pulau komoditi jagung disebabkan karena permintaan jagung dari luar daerah maupun luar negeri yang semakin meningkat. Hal ini akibat adanya upaya promosi yang sangat intens dan gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Dengan demikian jumlah ekspor dan perdagangan antar pulau komoditi jagung terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada realisasi ekspor antar pulau pada tahun 2004 sebesar 27.554 Ton

meningkat menjadi 127.561 Ton pada tahun 2005 dan sampai pada posisi juni 2006 realisasi ekspor dan antar pulau sudah mencapai 52.207 Ton.

Dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran pengembangan program Agropolitan, beberapa output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan program pengembangan Agropolitan ini antara lain :

- a. Peningkatan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung yang diikuti oleh peningkatan pendapatan petani
- b. Adopsi teknologi oleh petani yang tinggi yang berdampak kepada permintaan petani terhadap sarana produksi (Benih, pupuk, yang terus meningkat).
- c. Meningkatnya jumlah alsintan (penggunaan alat dan mesin pertanian) yaitu : traktor, pemipil, dryer dan lantai jemur/alat jemur
- d. Memberikan dampak terhadap aktifitas lain yang mendukung program seperti bengkel-bengkel alsintan dan jasa angkutan
- e. Menjadi pusat perhatian nasional dan internasional dalam pengembangan jagung dan menjadi sasaran investor dan banyaknya kunjungan (studi banding)
- f. Adanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian
- g. Sumberdaya manusia petani dan petugas terus meningkat yang berdampak adopsi teknologi yang terus meningkat.

Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan Agropolitan terdapat beberapa output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Kantor Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Gorontalo antara lain ; terlatihnya 20 Orang petani penangkar, terlatihnya 20 orang petugas pengawas, terlatihnya 10 petugas laboratorium, tersedianya varietas yang sesuai dan memenuhi syarat, tersedianya sarana analisa contoh benih, terlaksananya pengawasan pemasaran benih, tersedianya benih dasar/pokok di tingkat petani, terlaksananya sosialisasi benih unggul di 5 Kab/Kota, tersedianya koleksi

10 pohon induk hortikultura, terbentuknya forum asosiasi perbenihan daerah, terbinanya 150 orang penangkar benih di 5 Kab/Kota dan terbangunnya laboratorium dan kantor.

Selanjutnya kegiatan yang dihasilkan oleh kantor Perlindungan Tanaman Provinsi Gorontalo untuk menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan Agropolitan antara lain terlaksananya gerakan pengendalian massal Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terlaksananya Bimtek pengamanan produk di Kawasan Agro Sentra industri jagung, terlaksananya pembinaan terhadap regu pengendali hama di Tingkat Kab/Kota, tersedianya agensi hayati (Titus Alba) dalam rangka pengendalian OPT tikus di Kab. Pohuwato, terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis, terlaksananya sosialisasi pengendalian OPT ramah lingkungan, terlaksananya penanggulangan hama/penyakit tanaman dan bertambahnya peralatan kantor dan laboratorium, tersedianya sarana Brigade (penyediaan Buffer Stock dan alat pengendali, tersedianya jumlah spesies Trichogramma dalam pengendalian OPT dan terlaksananya pelatihan petugas pengawas pestisida).

Sementara kegiatan Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo yang menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan Agropolitan antara lain terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 25 daerah irigasi, terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 7 Unit, terlaksananya Pemeliharaan Irigasi Rawa 1500 Ha, terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Permukaan 15,19 daerah irigasi, terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Air Tanah 34 Unit, terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 2,99 Buah, terbangunnya Irigasi Air Tanah sebanyak 19,13 Unit, terbangunnya PS Pengendali Banjir 7 Kawasan, terbangunnya PS Pengaman Pantai 2 Kawasan, terbangunnya PS Irigasi Pompa Air Tanpa Mesin 1 Unit/700 Ha, terbangunnya Jalan Akses 40 Km, terpeliharanya Jalan Akses Agropolitan 71,35 Km.

Dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo yang menunjang keberhasilan program agropolitan antara lain bertambahnya sarana dan prasarana di lingkungan Bandara Djalaludin : Lingkungan Gedung, terminal sementara, perluasan Apron dan Fillet serta Fasilitas Keselamatan Penerbangan, terlaksananya rehabilitasi Prasarana Transportasi Laut, terlaksananya Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang, terbangunnya Kapal Perintis 500 GRT, terbangunnya dermaga penyeberangan, terlaksananya Rehabilitasi Kantor Adpel Gorontalo.

### 1.3 Pengembangan Perikanan dan Kelautan

Tabel III-4. Matriks Capaian Kinerja Sasaran Program Pengembangan Etalase Perikanan Provinsi Gorontalo 2002 - 2006

SASARAN 2	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
		2002	2003	2004	2005	2006*
B. Terwujudnya percepatan pembangunan dan per-ekonomian daerah dengan memacu perkembangan sektor perikanan.	1. Meningkatnya Jumlah produksi Ikan (Ton)	38.128,5	40.316,8	43.286,6	46.026,1	55.073,3
	2. Meningkatnya Jumlah pendapatan nelayan (Rp.)/bulan	546.517	572.547	602.115	855.667	987.373
	3. Meningkatnya jumlah pendapatan pembudidaya ikan Rp./bulan	293.249	405.801	709.968	727.648	750.427
	4. Meningkatnya Jumlah ekspor dan perdagangan antar pulau Ikan (Ton)	1.177,3	1.669,9	8.967,7	9.234,0	10.157,4

Sumber : Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo (2006)

\* Angka Proyeksi

Pembangunan perikanan dan kelautan merupakan salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo. Pada periode tahun 2002-2006 telah dilaksanakan berbagai Program / Kegiatan pembangunan perikanan, yang membawa dampak berupa peningkatan jumlah produksi

hasil perikanan, peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, serta peningkatan volume ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan sebagaimana diuraikan pada tabel Tabel III-4.

Jumlah produksi ikan Provinsi Gorontalo tahun 2005 sebesar 46.026,1 ton, meningkat 20,71 % bila dibandingkan produksi ikan tahun 2002 sebesar 38.128,5 ton. Produksi ikan tahun 2006 diperkirakan akan mencapai 55.073,3 ton atau meningkat 44,44 % bila dibandingkan produksi ikan tahun 2002. Demikian juga dengan nilai produksi hasil perikanan, mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada tahun 2002, nilai produksi hasil perikanan Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 123.436.460.000,- Sedangkan nilai produksi tahun 2005 sebesar 217.204.978.500,- atau meningkat 75,97 %. Diperkirakan nilai produksi ikan tahun 2006 akan mencapai Rp. 224.205.932.000,- atau meningkat 81,64 % bila dibandingkan nilai produksi ikan tahun 2002.

Pendapatan rata-rata nelayan dan pembudidaya ikan di Provinsi Gorontalo selang tahun 2002-2006 juga mengalami peningkatan. Pendapatan nelayan tahun 2005 sebesar Rp. 855.667,- / bulan, meningkat 56,57 % bila dibandingkan pendapatan rata-rata nelayan tahun 2002 sebesar Rp. 546.517,- / bulan. Pendapatan nelayan tahun 2006 diperkirakan akan mencapai Rp. 987.373,- / bulan atau meningkat 80,67 % dibandingkan pendapatan tahun 2002.

Pendapatan rata-rata pembudidaya ikan tahun 2005 sebesar Rp. 727.648,- / bulan, meningkat 148,13 % bila dibandingkan pendapatan tahun 2002 sebesar Rp. 293.249,- / bulan. Pendapatan tahun 2006 diperkirakan akan mencapai Rp. 750.427,- / bulan atau meningkat 155,90 % bila dibandingkan pendapatan tahun 2002.

Jumlah volume ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan Provinsi Gorontalo selang tahun 2001 -2006 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 volume ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan sebesar 9.234 ton. Meningkat 684,34 %

dibandingkan tahun 2002 sebesar 1.177,3 ton. Pada tahun 2006, volume ekspor dan perdagangan antar pulau hasil perikanan diperkirakan akan mencapai 10.157,4 ton, atau meningkat 762,77 % bila dibandingkan tahun 2002.

Untuk menunjang kelancaran operasional, memberikan kemudahan bantuan permodalan, dan memberikan bantuan pembimbingan usaha kepada nelayan dan pembudidaya ikan, sejak tahun 2004 di Provinsi Gorontalo telah dibentuk pola pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui Unit Manajemen Taksi Mina Bahari (TMB). Unit Manajemen Taksi Mina Bahari dibentuk untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Diawali dengan dibentuknya unit manajemen TMB di 3 titik sentra nelayan yaitu Tenda, Kwandang, dan Tabulo. Pada tahun 2005 unit pelayanan TMB dikembangkan hingga menjadi 7 titik pelayanan dengan dibentuknya unit manajemen TMB Tongo, Batudaa Pantai, Gentuma, dan Lemito.

Jumlah anggaran yang telah disalurkan / disediakan untuk program Taksi Mina Bahari sampai dengan TA 2006 adalah sebesar Rp. 5.952.405.000,-. Terdiri dari Rp. 5.026.845.000,- bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo TA 2004 s/d TA 2006, dan sebesar Rp. 925.560.000,- bersumber dari APBN TA 2005 s/d TA 2006.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2006, jumlah nelayan dan pembudidaya rumput laut yang telah dilayani oleh 7 titik Unit Manajemen Taksi Mina Bahari sebanyak 1.229 orang. Terdiri dari nelayan dengan perahu katinting 588 orang, nelayan dengan alat pukat 56 orang, pembudidaya rumput laut 100 orang, nelayan dengan alat perahu 159 orang, dan nelayan dengan perahu mesin dalam / pukat cincin 326 orang.

Pelayanan yang diberikan oleh Unit Manajemen Taksi Mina Bahari terdiri dari 7 pelayanan yaitu :

- a. Lembaga Keuangan Nelayan.  
Sampai dengan 31 Maret 2006, Unit Manajemen Taksi Mina Bahari di 7 titik pelayanan telah menyalurkan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja kepada nelayan dan pembudidaya rumput laut sebesar Rp. 2.957.307.875,-. Dari jumlah kredit yang telah disalurkan tersebut, telah dikembalikan melalui angsuran sebanyak Rp. 1.013.561.750,- atau 34,27 %. Sedangkan sisanya dalam proses pengangsuran.
- b. Unit Pelayanan BBM.  
Sampai dengan 31 Maret 2006, jumlah penjualan BBM kepada nelayan melalui 7 titik pelayanan TMB, adalah senilai Rp. 521.966.712,-. Pelayanan ini sangat membantu dalam mendukung operasional perahu nelayan, memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan BBM pada saat dibutuhkan dengan harga yang terkendali.
- c. Unit Pelayanan Pabrik Es.  
Sampai dengan 31 Maret 2006, manajemen TMB memiliki 3 pabrik es yang berlokasi di Kwandang, Tongo, dan Tabulo. Jumlah penjualan es telah mencapai Rp. 418.318.000,-.
- d. Unit Pelayanan Galangan Kapal / Perbengkelan.  
Unit galangan kapal yang telah dibangun yaitu di TMB Tongo. Diharapkan galangan ini dapat melayani perbaikan kapal nelayan sampai dengan ukuran 30 GT.
- e. Unit Pelayanan Toserba Nelayan.  
Sampai dengan 31 Maret 2006, manajemen TMB memiliki 6 titik pelayanan toserba nelayan, yaitu Tongo, Batudaa Pantai, Tenda, Kwandang, Gentuma, dan Lemito. Pada tahun 2006 ini akan dibuka lagi Unit Pelayanan Toserba Nelayan di Tilamuta. Unit Pelayanan Toserba selain melayani kebutuhan operasional nelayan di laut, juga melayani kebutuhan keluarga nelayan.

f. Unit Pelayanan Pemasaran.

Fungsi unit pemasaran TMB antara lain memberikan fasilitasi serta membangun kemitraan antara nelayan anggota TMB dengan Pengusaha atau pembeli ikan.

g. Unit Klinik Bisnis.

Fungsi Unit Klinik Bisnis TMB antara lain melakukan bimbingan teknis dan manajemen usaha, melayani perbaikan kapal nelayan dan kapal yang dikelola TMB.

#### 1.4. Pengembangan Kemandirian Daerah

Pengembangan kemandirian daerah diharapkan membangun sektor ekonomi dan sosial budaya serta infrastruktur seperti diuraikan pada tabel 9 di bawah ini

Tabel III-5. Matriks Capaian Kinerja Sasaran Program Kemandirian Provinsi Gorontalo 2002 - 2006

SASARAN 3	INDIKATOR SASARAN	REALISASI (Tahun)				
		2002	2003	2004	2005	2006*
Mewujudkan masyarakat mandiri sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.	1. Meningkatnya populasi ternak (ekor)					
	- Sapi potong,	163.747	174.460	201.678	205.993	211.686
	- Kambing	83.602	92.874	92.944	93.009	129.383
	- Ayam buras	769.878	792.878	873.074	927.532	1.093.962
	2. Meningkatnya pendapatan Daerah	Rp 23,29 Milyar	Rp 39,88 Milyar	Rp 41,86 Milyar	Rp 46 Milyar	Rp 46,09 Milyar
	3. Meningkatnya Jumlah Koperasi yang aktif	378 Buah	419 Buah	445 Buah	447 Buah	447 Buah
	4. Meningkatnya jumlah jemaah Haji	400 Orang	503 Orang	916 Orang	806 Orang	817 Orang
	5. Meningkatnya penanganan penyandang masalah sosial	800 KK	2.110 KK	3.600 KK	5.630 KK	3000 KK
	6. Meningkatnya produk Hukum daerah	57 Perda	17 Perda	9 Perda	27 Perda	6 Perda

	7. Meningkatnya pembinaan bagi Orsospol, Orkemas dan LSM	75 Org	150 Org	200 Org	250 Org	2000 Org
	8. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan - Domestik - Mancanegara	13.456 538	25.445 539	39.658 365	52.364 563	52.375 600
	9. Mengurangi tingkat kecelakaan	213 Kejadian	251 Kejadian	296 Kejadian	269 Kejadian	173 Kejadian
	10. Meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang - Laut Penumpang(org) Barang (Ton/m3) - Udara Penumpang(org) Barang (Kg)	102.537 287.277 30.125 394.003	88.065 508.827 62.420 992.342	93.386 645.036 120.173 1.714.858	95.812 662.455 146.976 3.152.825	40.793 252.145 83.157 2.953.950
	11. Meningkatnya jumlah panjang jalan	1019,25 km	1094,00 km	915,30 km	1.024,54 Km	1095 km
	12. Meningkatnya ketersediaan air bersih	940 KK	1.125 KK	1.560 KK	1.865 KK	2.500 KK
	13. Tersedianya rumah layak Huni bagi masyarakat miskin	30 KK	50 KK	60 KK	123 KK	500 KK
	14. Meningkatnya kegiatan pengelolaan lingkungan	-	6 Kajian	15 Kajian	12 Kajian	7 Kajian
	15. Meningkatnya kualitas perencanaan	20 Dokumn	15 Dokumen	17 Dokumen	18 Dokumen	19 Dok

Sumber : SKPD Provinsi Gorontalo (2006)

\* Angka perkiraan

Capaian kinerja sasaran program peternakan sejak tahun 2002 sampai 2006 secara umum mengalami peningkatan sesuai dengan indikator sasaran yang telah dicapai. hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah populasi ternak sapi potong dari tahun ketahun dimana tahun 2001 populasi ternak sapi potong sebanyak 159.334 ekor, meningkat pada tahun 2002 menjadi 163.747 ekor atau 2,77 %, tahun

2003 sebanyak 174.460 ekor atau naik 6,5 %, tahun 2004 sebanyak 201.678 atau naik 15,60 %, tahun 2005 meningkat menjadi 205.993 ekor atau naik 2,14 % dan sampai dengan posisi juli 2006 jumlah populasi sapi potong naik menjadi 207.221 ekor atau naik 0,6 % dengan proyeksi sampai bulan Desember 2006 populasi sapi potong akan meningkat menjadi 211.686 ekor atau naik 2,76 %.

Kenaikan populasi ternak sapi potong yang flutuatif disebabkan oleh tingginya permintaan sapi potong baik untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah maupun memenuhi permintaan antar pulau yang dari tahun ketahun juga semakin meningkat, dimana tahun 2004 mencapai 4.803 ekor, kemudian pada tahun 2005 naik menjadi 5,305 ekor. Sedangkan untuk memenuhi permintaan antar pulau tahun 2001 9.948 ekor atau setara dengan Rp. 41,784,600,000,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) kemudian pada Tahun 2002 naik menjadi 13.304 ekor atau setara Rp. 55,676,800,000,- (Lima puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Tahun 2003 naik menjadi 14.293 ekor atau setara dengan Rp. 60,030,600,000,- (Enam puluh milyar tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan tahun 2004 mengalami penurunan menjadi 11.597 ekor atau setara dengan Rp. 48,707,400,000,- (Empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian pada Tahun 2005 naik kembali menjadi 15.843 ekor atau setara dengan Rp. 66,540,600,000,- (Enam Puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Untuk permintaan antar pulau Tahun 2006 sampai posisi Juli baru mencapai 4.802 ekor. Prediksi nilai sapi sampai posisi bulan desember 2006 permintaan akan naik mencapai 17.783 ekor atau setara dengan Rp. 74,688,600,000,- (tujuh puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).. Jadi sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 total pendapatan dari pengeluaran sapi potong ke antar pulau mencapai total Rp.

347,625,600,000,- (tiga ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Disamping itu selain terjadi kenaikan populasi secara kuantitatif sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 yang merupakan hasil aplikasi program pengembangan ternak sapi potong dengan system bergulir dan upaya pemerataan penyebaran di seluruh daerah Kabupaten juga secara kualitatif juga terlihat mengalami kenaikan kualitas. Hal ini merupakan upaya penanganan pengembangan dengan menerapkan teknologi kawin suntik / Inseminasi Buatan (IB) dan System mencegah penyakit yang dilakukan secara kontinyu.

Selain pengembangan ternak besar khusus sapi potong capaian kinerja juga terlihat pada pengembangan ternak kecil seperti kambing dan unggas serta ayam buras dan ayam ras.

Populasi ternak kambing pada Tahun 2001 sebanyak 58,076 ekor, kemudian pada Tahun 2002 naik menjadi 83,062 ekor atau terjadi kenaikan 43,02 % Tahun 2003 mengalami kenaikan populasi menjadi 92,874 ekor atau 11,81 % dan pada Tahun 2004 kenaikan populasi sebanyak 92,944 ekor, kemudian pada Tahun 2005 juga terjadi kenaikan populasi mencapai 93,009 ekor, selanjutnya pada tahun 2006 di proyeksikan naik menjadi 129.383 ekor.

Demikian juga untuk pengembangan ternak unggas khusus ayam mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2002 populasi ayam sebanyak 769,878 ekor, kemudian pada Tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi 792,878 ekor, Tahun 2004 menjadi 873.074 ekor dan pada Tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 927,532 ekor, selanjutnya pada tahun 2006 diproyeksikan naik menjadi 1.093.962 ekor.

Untuk daging ayam maupun telur juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 produksi daging ayam, daging ayam potong sebanyak 97,340 Kg, kemudian pada tahun 2002 naik menjadi 102 115 Kg dan pada tahun 2003 naik menjadi 107,440 Kg selanjutnya

pada tahun 2004 naik lagi menjadi 594,690 Kg dan pada tahun 2005 produksi daging ayam sebesar 405,218 Kg selang pada tahun 2006 naik menjadi 660,350 Kg.

Selanjutnya untuk produksi telur juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 produksi telur sebesar 194,365 Kg, tahun 2002 198,110 Kg, tahun 2003 213,681 Kg, dan tahun 2004 sebanyak 1724,470 Kg, tahun 2005 1,193,957 Kg dan pada tahun 2006 menjadi 896,393 Kg.

Kenaikan populasi ayam baik ayam buras maupun ayam ras disebabkan oleh motivasi yang makin meningkat dari masyarakat untuk usaha beternak ayam yang dipicu oleh rasa percaya dari masyarakat beternak terhadap upaya pemerintah dalam membina dan mencegah timbulnya wabah penyakit unggas yang disebut dengan Flu Burung (Avian Influenza) dapat dicegah dengan baik berkat upaya lebih dari yang dilakukan oleh Pemerintah.

Untuk tahun 2005 naik menjadi 10.305 ekor dan pada posisi juli 2006 mencapai 11.230 ekor. Selanjutnya antar pulau sapi potong tahun 2004 sebanyak 11.592 ekor, tahun 2005 menjadi 15.843 ekor dan pada posisi juli 2006 naik menjadi 17.783 ekor.

Disamping itu juga di Provinsi Gorontalo terdapat sejumlah ternak kecil yang perkembangannya setiap tahun terus mengalami peningkatan yaitu jumlah populasi kambing sampai dengan posisi bulan juli 2006 mencapai 129.383 ekor, ternak babi sebanyak 12.386 ekor, sementara itu jumlah populasi ayam buras terus mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebanyak 873.074 ekor, tahun 2005 mencapai 983.069 ekor dan pada posisi juli 2006 meningkat menjadi 1.093.962 ekor. Peningkatan jumlah produksi telur tahun 2005 sejumlah 1.924.437 kg dan pada posisi juli 2006 mencapai 2.258.237 kg.

Produksi daging ayam buras terus meningkat dimana tahun 2004 mencapai 1.291.669 kg/bulan, tahun 2005 sebesar 1.327.223 kg/bulan dan pada bulan juli 2006 meningkat menjadi 1.648.906 kg/bulan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya pendapatan daerah pada tahun 2002 sebesar Rp 23,29 Milyar, tahun 2003 naik menjadi Rp 39,88 Milyar, tahun 2004 meningkat menjadi Rp 41,86 Milyar, tahun 2005 naik menjadi Rp 46 Milyar selanjutnya tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 46,09 Milyar. Tingginya capaian kinerja ini akibat upaya pemerintah daerah melakukan intensifikasi pemungutan PAD serta mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan PAD yang baru, disamping itu akibat penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja yang memperoleh perhatian pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun kedepan pengembangan pendapatan daerah ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain keterbatasan mencari sumber-sumber baru yang dibatasi oleh pemerintah pusat bahkan ada beberapa sumber pendapatan daerah masih ditarik kepusat, masih kurangnya realisasi investasi baik PMA maupun PMDN.

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan pendapatan asli daerah, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2002 - 2006 antara lain; tersedianya perda tentang pajak & retribusi daerah, terlaksananya penagihan atas sejumlah tunggakan, terlaksananya pembangunan UPTB Bone Bolango, terlaksananya sosialisasi sadar pajak, terpilih jumlah wajib pajak teladan, tersedianya sistem aplikasi komputerisasi Samsat, Terlaksananya acara Forum Perpajakan Tingkat Regional / Nasional, tersedianya jumlah PNS yang mengikuti Bintek Perpajakan, terlaksananya pendidikan D-III STAN, terlaksananya pendidikan S-2 Keuangan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan koperasi Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya jumlah

koperasi yang aktif sejak tahun 2002 sampai dengan 2006 terus mengalami peningkatan dimana jumlah koperasi tahun 2002 sebanyak 378 unit, meningkat menjadi 419 unit tahun 2003 dan tahun 2004 naik menjadi 445 unit selanjutnya pada tahun 2005 meningkat menjadi 447 unit dan tahun 2006 data sementara berjumlah 447 unit dengan jumlah anggota sampai dengan tahun 2006 sebanyak 98.990 orang dan calon anggota sebanyak 1642 orang. Sedangkan jumlah modal sendiri sebanyak Rp. 42,374 Milyar dan modal luar sebanyak Rp. 115.055 Milyar. Dalam upaya pengembangan KUKM melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP koperasi sampai dengan tahun 2005 telah berhasil disalurkan kepada 105 koperasi dana bergulir sebesar Rp. 41.431 Milyar.

. Capaian kinerja ini akibat adanya peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi, adanya bantuan modal koperasi dan bertambahnya sarana/prasarana koperasi, juga implikasi dari tersusunnya perangkat regulasi dan fiskal terhadap pemberdayaan KUKM dari pemerintah dan dukungan masyarakat. Namun kedepan pengembangan koperasi ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain kurangnya kegiatan penataan organisasi manajemen KUKM, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan usaha KUKM, masih rendahnya produktifitas daya saing dan pangsa pasar KUKM dalam berbagai sektor dan kegiatan usaha, lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum KUKM serta keterbatasan permodalan dan kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan.

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan Koperasi, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas Nakertranskop Provinsi Gorontalo 2002 – 2006 antara lain; terlaksananya penyuluhan dan penyebaran Informasi, terlaksananya pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, terlaksananya pengembangan kelembagaan dan mitra usaha, terlaksananya pameran/promosi.

Capaian kinerja sasaran program peningkatan kesejahteraan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya jumlah jemaah Haji tahun 2002 sebanyak 400 orang, pada tahun 2003 naik menjadi 503 orang, pada tahun 2004 naik menjadi 916 orang, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 806 orang, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 817 orang. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat akibat pelaksanaan program provinsi yang fokus pada program yang menyentuh langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan intervensi dari jumlah anggaran APBN yang cukup besar. Namun kedepan pengembangan kesejahteraan ini masih menghadapi beberapa permasalahan seperti antara lain pemerataan pendapatan dan peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Capaian kinerja sasaran program peningkatan kesejahteraan sosial Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran penanganan penyandang masalah sosial tahun 2002 sebesar 800 Kepala Keluarga (KK), pada tahun 2003 naik menjadi 2.110 KK, pada tahun 2004 naik menjadi 3600 KK, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 5.630 KK, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan menjadi 3000 KK. Terealisasinya penanganan penyandang masalah sosial ini akibat adanya pemberian bantuan UEP langsung ke target sasaran dan adanya pembinaan yang intensif pada lembaga sosial. Namun kedepan pengembangan sosial ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain belum seluruh penyandang masalah sosial dapat tertangani khususnya anak terlantar dan komunitas adat terpencil (KAT).

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran Program penanganan permasalahan sosial dicapai melalui program antara lain bantuan dan jaminan sosial, program pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi sosial, program pembinaan sosial kemasayarakatan serta sarana

perbaikan lingkungan desa. Lebih lanjut beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2002 - 2006 antara lain terlaksananya bantuan kepada 310 KK fakir miskin, terbantunya organisasi sosial yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial, terpeliharanya TMP / MPN, tersantuninya keluarga perintis/pahlawan kemerdekaan, terbantunya anak asuh dalam Panti, terlaksananya penyuluhan sosial, tersedianya sarana perumahan layak huni, tertanganinya korban bencana dengan tepat waktu dan tepat sasaran, terlaksananya pemberdayaan komunitas adat terpencil, terbinanya generasi muda, tersalurnya bantuan dana kepada masyarakat, tersalurnya bantuan dana sosial keagamaan kepada masyarakat, tersalurnya bantuan dana kepada masyarakat melalui 10 Program PKK Provinsi Gorontalo, terlaksananya kegiatan 10 program pokok PKK, tersalurnya bantuan dana kepada Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, tersalurnya bantuan dana dalam rangka menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo, tersalurnya bantuan dana pendidikan S1 bagi masyarakat ekonomi lemah, tersalurnya bantuan dana kepada organisasi masyarakat bidang olahraga kesenian dan pemuda.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan Hukum Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya produk hukum daerah tahun 2002 sebanyak 57 Perda, pada tahun 2003 sebanyak 17 Perda, dan pada tahun 2004 sebanyak 9 Perda, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 27 Perda, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 6 Perda. Terealisasinya capaian kinerja ini akibat adanya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh legislatif, menata kembali kelembagaan agar berfungsi efisien dan efektif, serta untuk meningkatkan keteraturan masyarakat dalam segala aktifitasnya. Namun kedepan pengembangan hukum ini masih menghadapi beberapa

permasalahan antara lain belum semua produk hukum dijalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan, dan masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi aparat penegak hukum.

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program hukum, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 - 2006 antara lain; terlaksananya 25 kali penyuluhan hukum di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, terbentuknya Tim Bantuan Hukum, Terbentuknya 116 buah peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, terciptanya 1000 buku pohon hukum dan 1000 buku komunikasi politik sebagai bentuk pelaksanaan pemerintah yang menjunjung tinggi supremasi, terbentuknya 37 keputusan pelaksanaan perda, terwujudnya 23 perjanjian kerja sama yang mengikat bagi para pihak, tertatanya Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam rangka mengadakan kebijaksanaan baru dan dokumentasi hukum dengan baik, terbentuknya 6 unit kerja/kantor pelayanan percontohan, terlaksananya 6 kali sosialisasi produk hukum daerah, terbentuknya 6 unit kerja/kantor pelayanan percontohan, terbentuknya 20 organisasi perangkat daerah yang miskin struktur kaya fungsi, serta tersedianya 6 buku data analisis jabatan.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui percepatan korupsi di jajaran pemerintah telah pula dilakukan kerjasama antara pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota yang turut ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang selanjutnya dilakukan kerjasama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan institusi terkait dalam penegakan hukum baik dengan pihak

Kejaksanaan Tinggi Gorontalo maupun dengan pihak Kepolisian Daerah Gorontalo.

Capaian kinerja sasaran program koordinasi pembangunan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran Pembinaan Teknis Tata Cara pengadaan Barang dan Jasa 4 (empat) kali, Peningkatan SDM berupa ujian Sertifikasi bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, Koordinasi dan Pengendalian Program Provinsi 3 (tiga) kali, kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Program Pembangunan Lintas Kab/Kota sebanyak 3 (tiga) kali, Pelaksanaan Tugas-tugas Khusus yang Strategis bidang pembangunan yang terdiri dari : Perencanaan Pembangunan bangunan inventaris 6 (enam) paket, sedangkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin maupun insidental dilaksanakan setiap bulan sejak tahun 2002 s/d 2006.

Begitupun pelaksanaan Rakorev dilaksanakan di tingkat Provinsi maupun di tingkat kab/kota setiap triwulan sejak tahun 2002 s/d 2006. Adapun sejak T.A 2006 Biro Pembangunan mengalokasikan kegiatan yang cukup strategis untuk menuju tupoksi Biro Pembangunan yaitu pengolahan data dengan menggunakan teknologi sistem informasi geografi (SIG/GIS) dan program sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) yang terpadu.

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pengendalian dan koordinasi program pembangunan secara terpadu maka Biro Pembangunan telah mengadakan koordinasi dan pengendalian serta monitoring kegiatan pembangunan bersama-sama instansi teknis terkait bahkan melibatkan unsur legislatif.

Adapun dampak dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh Biro Pembangunan sejak tahun 2002 s/d 2006 adalah antara lain :

- Tertibnya penyelenggaraan tata cara pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah daerah
- Meningkatnya SDM staf pengelola teknis kegiatan proyek
- Program APBD lebih teratur, terarah dan tepat sasaran.
- Terciptanya perencanaan dan analisa data lebih cepat dan mudah diakses.
- Pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran.
- Terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Capaian kinerja sasaran program kesatuan bangsa dan politik melalui indikator sasaran meningkatnya pembinaan bagi Orsospol, Orkemas dan LSM dalam menunjang pembangunan daerah tahun 2002 yang dibina sebanyak 75 Orang, pada tahun 2003 naik menjadi 150 orang, pada tahun 2004 naik menjadi 200orang, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 250 orang, sedangkan pada tahun 2006 naik menjadi 2000 orang. Selanjutnya indikator meningkatnya wawasan kebangsaan dalam menjaga kesatuan dan persatuan dikalangan masyarakat maka tahun 2002 yang dibina sebanyak 100 Orang, pada tahun 2003 naik menjadi 150 orang, pada tahun 2004 naik menjadi 250 orang, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 300 orang, sedangkan pada tahun 2006 naik menjadi 6000 orang. Hasil pembinaan yang dilakukan ini berakibat pada terjalinnya hubungan yang harmonis dan kondusif dengan lembaga infra dan suprastruktur politik, berkembangnya dan makin meningkatnya kepedulian organisasi kemasayarakatan dalam pemberdayaan masyarakat, terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial, etnis dan gerakan ketidakpuasan masyarakat, berperanya tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan kedamaian hidup dimasyarakat serta meningkatnya kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana.

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program kesatuan bangsa dan politik, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo tahun 2002 - 2006 antara lain; terlaksananya peningkatan ketahanan politik stabilitas keamanan dan ketertiban terlatihnya 75 Orang Intelijen, terlaksananya kegiatan koordinasi Orang Asing, tersedianya pengawalan dan pengamanan pejabat Provinsi, terlaksananya razia pelanggaran Perda dan SK Gubernur, terlaksananya Koordinasi antar Puskordalops PBP dan Puslakdalops PBP, terlaksananya peningkatan SDM satuan Linmas, terciptanya koordinasi antar Kesbang Provinsi dan Kesbang Kab/Kota.

Disamping itu keberhasilan sasaran program kesatuan bangsa dan politik ini juga ditunjang oleh program Biro Pemerintahan berupa peningkatan nilai – nilai Budaya tetap yang dijunjung tinggi sebagai wahana pemersatu yang pada intinya dapat menciptakan Kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan sehari – hari walaupun kondisi Stabilitas Daerah yang kondusif dengan senantiasa mengembangkan langkah / upaya antara lain:

- a. Mengefektifkan dan meningkatkan peran forum MUSPIDA yang merupakan wadah strategi pimpinan daerah dalam rangka mengkoordinasikan dan membahas perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Secara berkala setiap bulannya diagendakan pertemuan Formal MUSPIDA dan pertemuan lainnya yang dianggap perlu.
- b. Membina kerukunan umat beragama di Daerah dengan melibatkan segenap unsur masyarakat.
- c. Menyampaikan sejumlah petunjuk melalui surat dan kawat kepada Pemerintah Daerah Kab./ Kota terutama yang berkaitan dengan tindaklanjut petunjuk Pemerintah Pusat dalam hal pola penanganan dini kerwanan di daerah

Lebih lanjut untuk meningkatkan suasana kondusif dan harmonis di daerah, dilakukan langkah-langkah koordinatif antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Provinsi Gorontalo yang menghadirkan para Bupati dan Walikota se Provinsi Gorontalo tahun 2001 3 (tiga) kali, tahun 2002 3 (tiga) kali, tahun 2003 4 (empat) kali, tahun 2004 4 (empat) kali, tahun 2005 4 (empat) kali dan tahun 2006 sampai bulan Juli baru 1 (satu) kali. Sedangkan Forum Pimpinan Kecamatan (Camat, Kapolsek, Dan Ramil, Kacabjari) tahun 2001 1 kali, tahun 2002 1 kali, tahun 2003 1 kali, tahun 2004 1 kali, tahun 2005 2 kali dan sampai Juli 2006 sudah 2 kali. Pelaksanaan rapat koordinasi dan Forum PIKA tersebut diatas dalam kenyataannya dampaknya sangat positif bagi sinron dan sinerginya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah sekaligus dapat meredam permasalahan di tingkat lokal.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan pariwisata Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara berkunjung ke Provinsi Gorontalo pada 2002 sebanyak 13.456 Wisnus dan 538 Wisman, tahun 2003 sebanyak 25.445 Wisnus dan 539 Wisman, tahun 2005 adalah sebanyak 52.364 Wisnus dan 563 Wisman masih lebih tinggi dari kunjungan Wisnus dan Wisman pada 2004 yang hanya berjumlah 39.658 Wisnus dan 365 Wisman. Sedangkan tahun 2006 data sementara sejumlah 52.375 Wisnus, 600 Wisman

Capaian kinerja ini akibat gencarnya promosi dan beberapa event yang diselenggarakan baik didalam maupun diluar daerah. Namun kedepan pengembangan pariwisata ini masih menghadapi beberapa permasalahan seperti antara lain belum adanya rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA) Provinsi Gorontalo, dana anggaran promosi yang belum memadai, belum adanya jadwal penerbangan reguler dari dan ke Manado, kurangnya SDM yang

profesional di bidang pariwisata, serta jalinan koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang belum optimal.

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan pariwisata, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo 2002 - 2006 antara lain; tersedianya booklet, kalender event dan brosur, terikutinya ekspo di luar daerah, terlaksananya pentas musik tradisional dan lintas budaya di Jakarta, terpilihnya Nou dan Uti 2005, terpilihnya Putri Gorontalo dan 37 orang peserta Gita Bahana Nusantara, terlaksananya keikutsertaan pada Festival Boga, terlaksananya keikutsertaan pada gebyar pameran wisata Nusantara 2005, terlaksananya keikutsertaan pada Sulawesi Ekspo, terlaksananya keikutsertaan pada Festival Tari Tradisional dan Kalamatra Nusantara.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan perhubungan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran mengurangi jumlah kecelakaan pada tahun 2002 adalah sebanyak 213 kejadian, 2003 sebanyak 251 kejadian dan 2005 adalah sebesar 269 kejadian masih lebih rendah dari jumlah kecelakaan 2004 yang berjumlah 296 kejadian atau menurun sebesar 9,29 % sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 173 kejadian. Capaian kinerja ini diakibatkan bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan upaya pemerintah daerah melakukan penertiban di jalan serta pemberian sosialisasi/bimbingan teknis terhadap aparatur pelaksana di lapangan. Namun kedepan pengembangan perhubungan darat ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi di bidang LLAJ, terbatasnya pengalokasian anggaran untuk sektor ini disisi lain sebagian besar medan ruas jalan menuju ke kab/kota dan atau ke provinsi lain mempunyai tingkat hambatan cukup tinggi serta terbatasnya fasilitas operasional untuk melakukan pemantauan/monitoring.

Selanjutnya peningkatan pembangunan infrastruktur perhubungan sangat berdampak pada pertumbuhan kualitas dan kuantitas layanan dan kenyamanan dalam beraktivitas di daerah ini. Disub sektor perhubungan darat terlihat pada peningkatan kendaraan penumpang masuk dan keluar terminal baik angkutan kendaraan antar provinsi maupun angkutan kendaraan dalam provinsi hingga mencapai 4,17%. Pertumbuhan ini diikuti pula dengan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi terminal tipe A sebanyak dua unit, tipe B enam unit, dan tipe C sebanyak tujuh unit. Demikian pula dengan kualitas layanan melalui pembangunan fasilitas jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, traffic light, pagar pengaman jalan. Saat ini provinsi Gorontalo telah membangun rambu-rambu lalu lintas sejumlah 1.624 buah dan pagar pengaman jalan sepanjang 2.560 meter yang tersebar dilima daerah. Untuk meningkatkan pelayanan penyebrangan melalui dermaga pelabuhan penyebrangan Gorontalo telah dibangun talud beton sepanjang 230 meter, pagar pengaman 141 meter, dan tiga unit rumah dinas, disamping penambahan kapal penyebrangan menjadi 2 unit.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan perhubungan laut Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang tahun 2002 jumlah arus penumpang sebanyak 102.537 orang, pada tahun 2003 menjadi 88.065 orang, pada tahun 2004 naik menjadi 93.386 orang, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 95.812 orang, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 40.793 orang sedangkan arus barang pada tahun 2002 jumlah barang sebanyak 287.277 Ton/M3, pada tahun 2003 naik menjadi 508.827 Ton/M3, pada tahun 2004 naik menjadi 645.036 Ton/M3, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 662.455 Ton/M3, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 252.145 Ton/M3. Tingginya capaian kinerja ini diakibatkan terjadinya peningkatan yang signifikan produksi komoditas dalam daerah dari berbagai sektor, adanya

perda kemudahan investasi dan meningkatnya pendapatan masyarakat serta ditunjang oleh peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan. Namun kedepan pengembangan Perhubungan Laut menghadapi beberapa permasalahan, antara lain status keberadaan pelabuhan nasional dan regional yang ada di daerah masih merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat sehingga hubungan antara pemerintah daerah dengan pengelola pelabuhan (Syahbandar) hanya sebatas koordinasi, masih terbatasnya SDM yang ada di masing-masing pelabuhan (jumlah SDM yang ada saat ini masih sama dengan jumlah SDM sebelum provinsi terbentuk) dan alokasi anggaran untuk sektor ini masih terbatas. Khusus untuk Pelabuhan Tilamuta sampai saat ini belum memiliki fasilitas dermaga.

Selanjutnya pelayanan disubsektor perhubungan laut di provinsi Gorontalo terdapat 3 pelabuhan nasional dan satu pelabuhan regional, disamping pelabuhan rakyat yang tersebar di kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato. Guna meningkatkan pelayanan kepelabuhanan melalui Pelabuhan Nasional seperti pelabuhan Gorontalo telah diadakan replacement total pada tahun 2002 untuk dermaga II dan resettlement untuk dermaga I pada tahun 2005. Sementara setiap tahunnya pelabuhan ini diadakan pemeliharaan secara rutin melalui dana APBN maupun APBD provinsi. Demikian pula dengan pelabuhan Kwandang telah diadakan replacemen dermaga dari kayu ke beton pada tahun 2004 dan rehab total terminal penumpang dan kantor pada tahun 2005, selain diadakan pemeliharaan rutin. Pelabuhan Anggrek diadakan perpanjangan dermaga pada tahun 2003 sepanjang 33 meter sehingga saat ini telah menjadi 153 meter x 12 meter. Rehabilitasi kantor pelabuhan seluas 72 m<sup>2</sup> pada tahun 2004 telah dilaksanakan pada pelabuhan Tilamuta.

Peningkatan fasilitas pelabuhan berdampak langsung pada pelayanan arus bongkar muat barang. Bongkar muat barang melalui

pelabuhan nasional dan pelabuhan regional terjadi peningkatan rata-rata arus bongkar barang dalam negeri mencapai 134,51%, arus muat mencapai 152,39%. Selanjutnya arus muat barang ke luar negeri mencapai hingga 43,02%.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan Perhubungan Udara Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya jumlah arus penumpang dan barang (bagasi, cargo dan pos) tahun 2002 jumlah arus penumpang sebanyak 30.125 orang, pada tahun 2003 menjadi 62.420 orang, pada tahun 2004 naik menjadi 120.173 orang, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 146.976 orang, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 83.157 orang sedangkan arus barang pada tahun 2002 jumlah barang sebanyak 394.003 Kg, pada tahun 2003 naik menjadi 992.342 Kg, pada tahun 2004 naik menjadi 1.714.858 Kg, selanjutnya pada tahun 2005 naik menjadi 3.152.825 Kg, sedangkan pada tahun 2006 data sementara sebanyak 2.953.950 Kg. Pencapaian kinerja ini diakibatkan meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa pelayanan angkutan udara, peningkatan lalulintas produksi penumpang dan barang, meningkatnya pendapatan masyarakat serta ditunjang oleh peningkatan sarana dan prasarana Bandara Djalaludin. Namun kedepan pengembangan perhubungan udara menghadapi beberapa permasalahan, antara lain status keberadaan bandara di daerah masih merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat sehingga hubungan antara pemerintah daerah dengan pengelola bandara hanya sebatas koordinasi, masih terbatasnya SDM yang ada, dan belum tersedianya lahan untuk pengembangan sesuai dengan master plan (lahan yang dibutuhkan seluas 288,12 Ha).

Dukungan fasilitas bandara Djalaluddin Gorontalo menjadikan bandara ini dapat didarati oleh jenis MD-92 dan Buing 737 seri 400. Dukungan fasilitas tersebut meliputi fasilitas sisi udara yaitu perpanjangan runway pada tahun 2003 menjadi 2.250 meter x 30 meter,

turning area tahun 2004 menjadi 3 x 1.200 m<sup>2</sup> . Fasilitas sisi darat meliputi perluasan terminal tahun 2005 menjadi 1.300 m<sup>2</sup>, pembangunan gudang kargo tahun 2003 seluas 220 m<sup>2</sup>, lapangan parkir tahun 2004 menjadi 1.600 m<sup>2</sup>, pembangunan Gedung VIP tahun 2004 seluas 370 m<sup>2</sup>. Selain itu diadakan pemeliharaan secara rutin dan rekonstruksi dari tahun 2003 sampai 2006.

Dampak dari pengembangan fasilitas bandara Djalaluddin dapat dilihat pada arus lalu lintas udara baik jumlah pesawat tiba, kedatangan dan keberangkatan penumpang maupun jumlah cargo bongkar muat melalui bandara. Jumlah pesawat tiba mengalami peningkatan hingga 106,03%, jumlah penumpang tiba mengalami pertumbuhan hingga 495,36%, penumpang berangkat 421,81%, cargo yang dibongkar mengalami peningkatan 69,77%, dan cargo yang terangkut meningkat secara signifikan hingga 224,31%.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan infrastruktur jalan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya panjang jalan tahun 2002 sepanjang 1.019,25 km, tahun 2003 naik menjadi 1.094 km, tahun 2005 mencapai panjang 1.017 Km masih lebih tinggi dari 2004 dengan panjang jalan mencapai 915,30 Km atau meningkat sebesar 11,33 %. Pada tahun 2006 data sementara panjang jalan mencapai 1.095 Km. Capaian kinerja ini akibat tersedianya rencana dan anggaran pembangunan. Namun kedepan pengembangan infrastruktur jalan ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain sistem manajemen transportasi masih perlu dibenahi dan merupakan masalah nasional dalam pengembangan infrastruktur, perlu peningkatan SDM yang memiliki kemampuan pemeliharaan jalan dan jembatan. Namun bertambahnya panjang jalan berdampak pada semakin besarnya jumlah jalan yang rusak berat sebesar 317,75 Km.

Selanjutnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur harus menjadi prioritas karena secara langsung akan mempengaruhi derajat

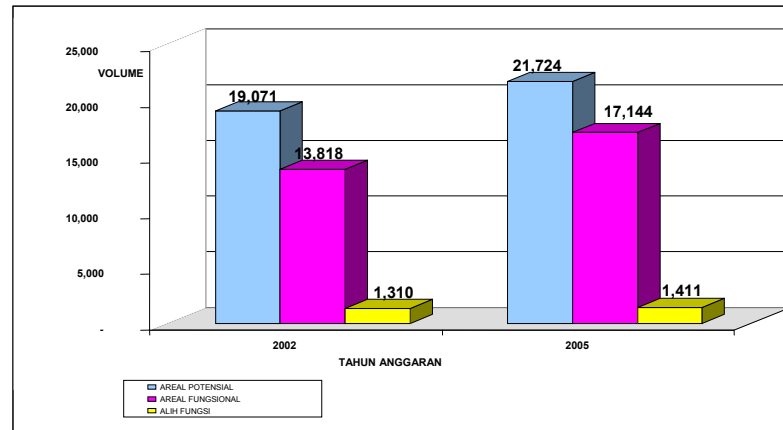
kecepatan pembangunan, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Keterbatasan infrastruktur sedikit banyak telah mengurangi daya saing komoditas andalan Provinsi Gorontalo. Dengan adanya infrastruktur yang memadai maka akan mampu menarik minat investor melakukan kegiatan usaha di Provinsi Gorontalo dan juga akan meningkatkan kemampuan akses lalu lintas barang dan jasa ke daerah lain.

Ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas jalan, jembatan, pergudangan, bandara udara dan pelabuhan laut berpotensi menjadikan Gorontalo sebagai sentra pertumbuhan di mandala Teluk Gorontalo/Tomini. Ruas jalan yang ada untuk tahun 2001 sepanjang 1.019,25 km, yang terdiri atas ruas jalan nasional sepanjang 551,03 km dan ruas jalan Provinsi yang panjangnya mencapai 468,22 km sedangkan untuk tahun 2005 sepanjang 1.024,50 ini terjadi peningkatan ruas jalan nasional sepanjang 616,24 km sementara ruas jalan provinsi menurun menjadi 408,26 km, hal ini disebabkan karena terjadi perubahan alih status ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional.

Pembangunan jalan Provinsi dan Akses agropolitan ditujukan untuk memperlancar sistem jaringan jalan baik yang dapat memperlancar akses antar kabupaten, kecamatan dan terutama akses kesentra-sentra produksi jagung dan perikanan sebagai penunjang program Gorontalo menuju 1 Juta Ton Jagung dan etalase perikanan. Pada selang waktu tahun 2002-2006 Jalan akses yang sudah dibangun pemerintah kurang lebih sepanjang 156,70 km dari target yang di butuhkan sepanjang 1.000 km atau baru sekitar 15,7 %.

Untuk menunjang program 1 Juta Ton jagung diperlukan pengembangan wilayah irigasi. Adapun kondisi wilayah irigasi selang waktu lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada grafik berikut.

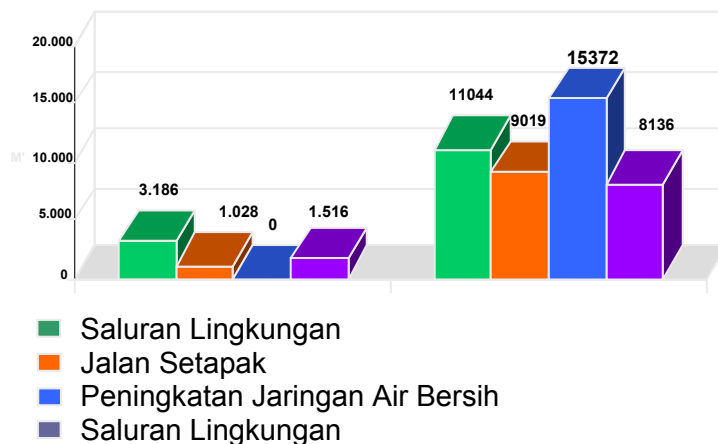
Gambar 2. Kondisi Wilayah Irigasi



Sementara untuk bidang perumahan dan pemukiman selang lima tahun terakhir terjadi peningkatan sarana dan prasarana antara lain peningkatan saluran lingkungan sebesar 71,15 %, jalan setapak 88,6 %, jaringan air bersih 80 % dan jalan lingkungan sebesar 81,37 %.

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan jalan, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo 2002 - 2006 antara lain; terlaksananya pemeliharaan jalan, terlaksananya peningkatan dan pembangunan jalan, terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan Jembatan, terlaksananya Pengawasan/Supervisi Konstruksi jalan dan jembatan, terlaksananya Perencanaan Teknis Jalan & Jembatan Provinsi Gorontalo.

Gambar 3. Kondisi Lingkungan, Jalan dan Air Bersih



Capaian kinerja sasaran program pengembangan air bersih Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya ketersediaan air bersih pada tahun 2002 sebanyak 14.722 KK, tahun 2003 naik menjadi 15.662 KK, 2005 yang mencapai 18.465 Kepala Keluarga (KK) masih lebih tinggi dibandingkan 2004 yang hanya berjumlah 16.787 KK atau meningkat sebesar 9,99 %. Pada tahun 2006 data sementara sebanyak 2.500 KK. Capaian kinerja ini akibat meningkatnya alokasi anggaran yang berdampak pada peningkatan cakupan pelayanan air bersih, tersusunnya Renstra pembangunan air bersih untuk Provinsi dan tiga Kabupaten yang menjadi pedoman pengembangan program air minum dan penyehatan lingkungan dan tersedianya data base kebutuhan dan cakupan air minum Provinsi Gorontalo yang merupakan acuan seluruh kebijakan pembangunan air bersih menuju MDG's 2015. Namun kedepan pengembangan air bersih ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain berkurangnya sumber air akibat rusaknya daerah tangkapan air (hutan), meningkatnya pencemaran sumber air baku akibat kegiatan penambangan disekitar sumber air, dan belum optimalnya perencanaan dan pembangunan air bersih oleh masing-masing sektor yang disebabkan oleh egoisme sektoral dan proyek oriented.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan pemukiman Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2002 sebanyak 30 KK, tahun 2003 naik menjadi 50 KK dan pada tahun 2005 adalah sebanyak 123 KK masih lebih tinggi dari jumlah ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 2004 yang hanya berjumlah 106 KK atau meningkat sebesar 16,03%. Sedangkan tahun 2006 data sementara sejumlah 500 KK. Capaian kinerja ini akibat pemerintah konsern terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat miskin hal ini dilakukan melihat kebutuhan rumah yang belum sesuai dengan standar kesehatan yang memadai. Namun

kedepan pengembangan pemukiman ini masih menghadapi beberapa Permasalahan antara lain ketersediaan status kepemilikan lahan oleh masyarakat miskin dan kesadaran masyarakat masih rendah tentang kepedulian hidup sehat.

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan pemukiman, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo 2005 antara lain; terlaksananya pengembangan Lingkungan perumahan pada Kawasan Terpilih Pusat pengembangan Desa (KTP2D), terlaksananya bantuan bahan bangunan dan PSD perumahan dan permukiman, terlaksananya penataan kembali lingkungan permukiman tradisional, terlaksananya peningkatan lingkungan permukiman kumuh kawasan kumuh andalan, terlaksananya manajemen wilayah pemberdayaan komunitas perumahan, terlaksananya pendamping masyarakat dalam penataan kawasan kumuh andalan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan lingkungan hidup Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup tahun 2002 belum ada kajian karena Bapelitbang saat itu belum terbentuk pada tahun 2003 jumlah kajian sebanyak 6 Kajian, pada tahun 2004 naik menjadi 15 kajian, selanjutnya pada tahun 2005 menjadi 12 kajian, sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 7 kajian. Capaian kinerja ini mengikuti gerak pembangunan Provinsi Gorontalo yang sangat dinamis, semakin bervariasinya tuntutan masyarakat akan hasil-hasil pembangunan, semakin kerasnya persaingan baik regional, nasional maupun global menghendaki upaya-upaya percepatan, peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Di lain pihak, selain menghasilkan dampak positif pembangunan juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup diperlukan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat berkelanjutan.

Penelitian, pengembangan dan pengendalian dampak lingkungan pada tahun 2003-2005 diarahkan untuk menghasilkan (1) inovasi teknologi, (2) menyediakan data dasar untuk perencanaan pembangunan, (3) menyusun rekomendasi kebijakan untuk memecahkan masalah pembangunan, dan (4) pengembangan sumberdaya penelitian dan pengembangan serta pengendalian dampak lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut ditujukan untuk :

- a. Menghasilkan instrument – instrument penelitian : program unggulan, konservasi lingkungan hidup dan penilaian kinerja aparat pemerintahan dalam menunjang implementasi prinsip-prinsip Good Governance
- b. Menghasilkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan menunjang program unggulan Provinsi disektor Penyerapan SDM, pertanian, perikanan dan kelautan.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian, pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup dapat dikelompokkan dalam lima kegiatan besar yang meliputi, Kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Aparatur, dimana dalam selang waktu tahun 2003 – 2005 dilaksanakan 11 kegiatan yang menghasilkan 291 aparat yang terlatih melalui kursus-kursus, Bintek dan berbagai pelatihan-pelatihan. Dampaknya adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur di bidang penelitian, penilaian dan penyusunan dokumen AMDAL, terbentuknya Pejabat PPLHD, terbentuknya Tim Komisi AMDAL dan Pengawas lingkungan Provinsi Gorontalo.

Untuk pengembangan pertanian telah dilakukan 13 kegiatan yang meliputi Analisa-analisa, kajian-kajian, pengembangan model-model sistem usaha tani dan industri masyarakat, termasuk peta-peta kesesuaian lahan jagung yang bermanfaat bagi peningkatkan ekonomi

masyarakat. Selanjutnya pengembangan perikanan dan kelautan juga telah dihasilkan 26 jenis kegiatan yang meliputi Kajian-kajian, Penelitian yang dimulai dengan sikap masyarakat terhadap etalase perikanan, sampai kepada penelitian pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan laut dan perairan Teluk Tomini Provinsi Gorontalo. Kajian dan penelitian ini telah menghasilkan data base pemanfaatan terumbu karang, rujukan luasan hutan mangrove yang dapat dikonversi, teknologi pengembangan budidaya rumput laut, rekomendasi teknologi penangkapan di teluk Tomini dan pantura Gorontalo serta dokumen ilmiah potensi Taman laut Olele.

Untuk bidang Pemerintahan telah dilaksanakan pula kajian-kajian, Lokakarya, koordinasi, Seminar, survey, Evaluasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian. Hasil-hasilnya adalah Teridentifikasinya permasalahan SDM aparatur pemerintah Prov. Gorontalo, terbentuknya Tim Komisi Penelitian dan pengembangan tingkat Provinsi, tersusunnya informasi tentang sistem pengelolaan keuangan provinsi, tersedianya data dan rekomendasi kebijakan sektor pendidikan, peningkatan peran, fungsi Dewan Riset daerah, alternatif penilaian kinerja PNS selain DP3 untuk menyempurnakan instrumen penilaian kinerja PNS serta tersusunnya peta potensi konflik yang ada di Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya untuk bidang lingkungan hidup sampai dengan akhir tahun 2005 telah dilaksanakan 24 jenis kegiatan yang meliputi studi-studi AMDAL, kajian-kajian, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian lingkungan, sosialisasi serta penyusunan Perda pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dan pencemaran air. Manfaat yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen AMDAL, RKL/RPL untuk kawasan-kawasan strategis seperti bandara Djalaludin, Pelabuhan Anggrek, meningkatnya pemahaman pengelolaan lingkungan hidup bagi LSM, LPM, Pers, aparat hukum dan swasta termasuk masyarakat, tersedianya data base kualitas sumber air untuk sungai Bone, sungai

Buladu, sungai Paguyaman, sungai Mopuya dan danau Limboto serta tersedianya data base dan informasi Taman nasional, Cagar alam dan Hutan Lindung.

Namun dalam pelaksanaannya, ditemui juga beberapa permasalahan dan tantangan pembangunan yang antisipasinya dilakukan dalam rangka pencapaian agenda pembangunan selama lima tahun. Beberapa permasalahan yang bisa diidentifikasi adalah :

- a. Dalam agenda menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional dengan penegakan sistem demokrasi dan supremasi hukum.
- b. Dalam Agenda Membangun Enterpreneurial Government dan masyarakat Mandiri, beberapa tantangan pokok yang mendapat perhatian serius adalah kualitas sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo masih rendah. Hal ini tercermin dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) tahun 2002 sebesar 59, walaupun indeks melek huruf telah mendapat nilai yang sangat baik, namun secara umum capaian HDI tersebut masih dibawah rata-rata nasional.
- c. Dalam Agenda Meningkatkan Peran Masyarakat sebagai Mitra dan pelaku utama Pembangunan, tantangan pokok yang dihadapi selang 5 tahun adalah :
  - 1) Derajat kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo masih rendah, dilihat dari tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH) serta rata-rata Anak-anak Lahir Hidup (ALH).
  - 2) Persoalan tenaga kerja menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius.
  - 3) Dari sisi pertumbuhan ekonomi, masih belum memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tahun 2001, perekonomian daerah dengan harga konstan hanya tumbuh

5,38%, dari sisi produksi masih didominasi leading sectors yaitu sektor pertanian. Hal ini sangat logis berdasarkan pertimbangan bahwa mayoritas penduduk masih bergerak dibidang pertanian.

- 4) Kesejahteraan masyarakat juga tidak lepas dari support infrastruktur dalam pembangunan. Sejak saat 2001, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, irigasi, ketenagalistrikan, air minum, masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketebatasan pembangunan infrastruktur tersebut, tidak bias dipungkiri karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah daerah.

Beberapa hal yang telah dilakukan sehubungan dengan pemecahan masalah-masalah yaitu, mencari peluang-peluang dan cara-cara baru untuk melakukan terobosan dalam pelaksanaan pembangunan, menghasilkan teknologi inovatif untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan dan menghasilkan teknologi yang meningkatkan nilai tambah bagi barang dan jasa. Serta menghasilkan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Inovasi yang dihasilkan meliputi : rekomendasi kebijakan, teknologi tepat guna skala kecil menengah, dan data serta informasi. Sedangkan ciri-ciri inovasi yang dihasilkan yaitu Spesifik lokasi, Skala kecil dan menengah; serta memiliki nilai tambah komersial dan ramah lingkungan.

Capaian kinerja sasaran program pengembangan perencanaan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tahun 2002 sebanyak 20 dokumen, tahun 2003 menjadi 15 dokumen, selanjutnya tahun 2004 naik menjadi 17 dokumen, dan tahun 2005 naik menjadi 18 dokumen sedangkan tahun 2006 naik menjadi 19 dokumen. Terealisasinya capaian kinerja ini akibat ketersediaan data yang akurat, meningkatnya SDM perencana sebagai dampak pelaksanaan diklat-diklat perencanaan, perbaikan mekanisme penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif, meningkatnya

koordinasi yang lebih terpadu antara Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Forum Bappeda. Namun kedepan pengembangan perencanaan ini masih menghadapi beberapa permasalahan antara lain koneksitas program yang belum optimal baik antara SKPD otonom dan instansi Vertikal, kualitas SDM perencana di SKPD yang belum optimal, serta belum tersedianya tenaga fungsional perencana.

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program Pengembangan perencanaan, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan pembangunan dan percepatan ekonomi Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2002- 2006 antara lain tersusunnya dokumen buku Profil Provinsi Gorontalo 2005, tersusunnya dokumen LKPJ Gubernur, tersedianya fasilitas sistem Informasi Profil Daerah, tersedianya data melalui web site, tersusunnya buku data Gorontalo dalam angka 2005, terlaksananya koordinasi dan konsultasi program AMPL dan SWASH, terkoordinasinya pelaksanaan program perencanaan ekonomi 2005, terlaksananya sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian program unggulan Provinsi Gorontalo, terlaksananya peningkatan kualitas pelaksanaan program/proyek pembangunan dan aparatur pelaksanaan, terkendalinya pelaksanaan pembangunan, terlaksananya Musrenbangda tingkat. Provinsi, Regional, Pusat dan Nasional, Tersedianya rencana program kerjasama antar Provinsi, tersedianya dokumen AKU Rencana Strategi & Prioritas Perencanaan Prov. Gorontalo, tersedianya buku Panduan Operasional Pemerintahan Daerah, tersusunnya Dokumen RPJMD dan rancangan awal RPJMD 2006-2026, terlaksananya koordinasi dan konsultasi program pengembangan wilayah & tata ruang & LH.

## **2. Dampak Pelaksanaan Pembangunan**

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja pembangunan dalam kurun waktu satu tahun adalah sejauh mana

pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Secara umum, dampak pelaksanaan pembangunan dapat dieksplor melalui 2 (dua) aspek utama yaitu indikator makro ekonomi dan indikator sosial budaya.

## **2.1 Indikator Makro Ekonomi**

Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo pada kurun waktu tahun 2002 sampai dengan 2006 telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend Pertumbuhan Ekonomi pada setiap tahun yakni tahun 2002 sebesar 6,45 %, tahun 2003 sebesar 6,88 % tahun 2004 sebesar 6,93 % dan pada tahun 2005 naik menjadi 7,06 %. Sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 6,66 %. Sementara itu kontribusi sektor terhadap PDRB pada tahun 2004 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,47 %, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 20,92 %, perdagangan, hotel, restoran sebesar 13,27 % dan sektor keuangan, persewahan dan jasa perusahaan sebesar 10,37 % selanjutnya pada tahun 2005 kontribusi pertanian mengalami sedikit pergeseran dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor pertanian mencapai 28,97 %, jasa-jasa sebesar 24,20% perdagangan, hotel dan restoran sebesar 12,13 % dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,76 % sementara itu kontribusi sektor-sektor lainnya berada dibawah 10 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo secara bertahap telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita Provinsi Gorontalo sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel III-6. Indikator Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2006

<b>Indikator Ekonomi</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006*</b>
Pertumbuhan Ekonomi	6,45	6,88	6,93	7,06	6,66 *)
Inflasi	7,8	5,16	8,64	18,55	0,80*)
PDRB ADHB (jutaan rupiah)	2.148.436	2.479.720	2.801.544	3.386.866	3.864.276
PDRB ADHK (jutaan rupiah)	1.655.328	1.769.188	1.891.763	2.025.321	2.160.154
PDRB perkapita ADHB (Rp.)	2.518.898	2.814.483	3.126.710	3.723.246	4.206.958
PDRB perkapita ADHK (Rp.)	1.940.762	2.008.029	2.111.334	2.226.474	2.351.715
Ekspor (Ton)	46.984,42	58.228,12	68.943,00	114.433,25	42.553,55 *)
Investasi (Rp) **	533 Milyar	753 Milyar	1,253 Trilyun	1.675 Trilyun	2,239 Trilyun

*Sumber : Badan Pusat Statistik (2006)*

*\* Angka Angka Proyeksi*

*\*\* Bappeda Provinsi Gorontalo*

*\*) Semester I 2006*

Struktur perekonomian Gorontalo dari tahun 2002 sampai 2006 masih didominasi oleh sektor pertanian. Yang meliputi komoditas tanaman pangan (padi, jagung), perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.

Sementara ekspor barang dari Provinsi Gorontalo 2002 sebesar 46.984,42 ton meningkat menjadi 114.433,25 ton di 2005, atau terjadi peningkatan sebesar 143,56 %. Pada tahun 2006 data sementara ekspor pada semester 1 sudah menunjukkan sebesar 42.563,56 Ton. Demikian halnya dengan nilai ekspor. Jika pada 2002 nilai ekspor Provinsi Gorontalo mencapai US\$ 3.226,21 juta maka pada 2005 meningkat menjadi US\$ 29,487 juta. Peningkatan terbesar dari volume ekspor adalah pada komoditi jagung dimana tahun 2002 baru berjumlah 6.300 ton tahun 2005 telah meningkat menjadi 40.698 ton dengan nilai tahun 2002 sebesar US\$.613 ribu meningkat menjadi US\$.4.407 juta pada tahun 2005 sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan bulan Mei berjumlah 21.531 ton dengan nilai US\$.2.462 juta. Komoditi lain yang

cukup memberikan kontribusi dalam peningkatan ekspor baik dari volume maupun nilai adalah minyak kelapa kasar dan bungkil kopra. Tingginya capaian kinerja ini akibat terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah produksi komoditas kelapa, jagung, ikan, kayu dan gula, adanya promosi didalam negeri dan luar negeri, banyaknya permintaan dari buyer, kualitas komoditi sesuai permintaan pasar, adanya penyuluhan dan bimbingan serta adanya Perda kemudahan investasi. Namun kedepan pengembangan ekspor ini masih menghadapi beberapa Permasalahan antara lain adanya kontribusi dan pajak yang besar, masih banyaknya eksportir mengeksport barangnya melalui pelabuhan lain maupun lewat darat dan antar pulau yang tidak terdeteksi yang memerlukan kerjasama lintas terkait serta belum adanya laboratorium untuk pengujian mutu barang sehingga pengujian masih harus lewat Manado dan Makassar.

Menyangkut total investasi, terjadi peningkatan sebesar 214,26 % dimana pada tahun 2002 jumlah investasi baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta berjumlah Rp.533 milyar dan pada tahun 2005 jumlah investasi telah meningkat menjadi Rp.1,675 trilyun. Hal ini cukup signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Gorontalo tahun 2005 mencapai 7,06 %. Pada tahun 2006 diperkirakan jumlah investasi di Provinsi Gorontalo meningkat menjadi Rp 2,239 Trilyun.

Selanjutnya dalam konteks menunjang keberhasilan sasaran Program ekspor dan investasi, beberapa output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo 2002 - 2006 antara lain; terlatihnya petugas / aparatur, terlaksananya peningkatan daya saing produk komoditi unggulan, terlaksananya peningkatan pengetahuan peserta pelatihan, terlaksananya peningkatan kualitas produk kerawang, Terlaksananya hak paten kerawang menjadi milik Provinsi Gorontalo, terlaksananya peningkatan kualitas anyaman mintu dan pea-pea, berkurangnya pedagang industri kecil kerawang yang menutup

usahanya, tersedianya buku Direktori Perusahaan, tersedianya Web Site Indag dan PM, tersedianya brosur dan leaflet, terlaksananya peningkatan pendapatan disektor 'perdagangan bagi pengusaha kecil, tersedianya alat kalibrasi yang memadai, terlaksananya pembinaan intensif dibidang PM kepada investor, terlaksananya koordinasi kebijakan dibidang penanaman modal Regional Sulawesi, terlaksananya pembinaan & pengendalian bagi perusahaan PMA & PMDN, terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan mutu, terlaksananya peningkatan omzet, terlaksananya peningkatan ekspor non migas, terlaksananya pembangunan gedung pusat promosi dan informasi.

## **2.2 Indikator Sosial Budaya**

Pertumbuhan penduduk selang lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,83 % hal ini terbukti bahwa jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 830.184 jiwa, tahun 2001 sebanyak 850 798 jiwa tahun 2002 sebanyak 855.057 Jiwa, pada tahun 2003 bertambah menjadi sejumlah 881.057 jiwa, selanjutnya pada tahun 2004 menjadi sebanyak 896.004 jiwa sementara 2005 telah mengalami peningkatan hingga mencapai jumlah 909.083 jiwa. Lebih lanjut pada tahun 2006 jumlah penduduk sampai dengan semester pertama sudah berjumlah 929.793 Jiwa. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya lonjakan jumlah penduduk antara lain adalah; adanya imigrasi masuk terutama pekerja atau pegawai baik pegawai negeri ataupun swasta / BUMN karena adanya perkembangan infrastruktur pemerintahan dan perekonomian sehingga Provinsi Gorontalo menjadi terbuka untuk daerah tujuan pencari kerja. Selain itu juga disebabkan oleh peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi serta meningkatnya usia harapan hidup.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas penduduk yang dikategorikan miskin pada tahun 2002 berjumlah 274.700 jiwa atau

sebesar 32,13 %, pada tahun 2003 penduduk miskin turun menjadi 267.936 jiwa atau sebesar 31,25 %. Selanjutnya pada tahun 2004 turun menjadi 258.824 Orang atau 28,89 % dari total penduduk. Sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 282.272 Orang atau 29,68 % dari total penduduk di Provinsi Gorontalo. Hal ini diduga disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan masyarakat karena adanya kenaikan harga BBM. Pada tahun 2006 diperkirakan jumlah penduduk miskin menurun menjadi sebanyak 275.153 Orang atau 29 % (sumber : Bappeda Provinsi Gorontalo). Hal ini disebabkan karena mulai membaiknya perekonomian masyarakat akibat hasil dari intervensi kegiatan yang intens dari berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan formal, terjadi peningkatan yang signifikan, sebagaimana sasaran program SDM yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi SDM masyarakat dengan indikator sasaran jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA

Bidang Tenaga Kerja, dari jumlah angkatan kerja sebanyak 329.358 orang atau 57,90 % dari jumlah penduduk usia kerja 568.836 Orang (15 tahun ke atas) pada tahun 2002, jumlah yang bekerja sebanyak 285.966 atau 42,10 %. Pada tahun 2003 jumlah angkatan kerja naik sebanyak 347.365 orang atau 59,71 % dari jumlah penduduk usia kerja 581.763 Orang (15 tahun ke atas), selanjutnya jumlah yang bekerja juga mengalami kenaikan menjadi 312.882 atau 40,29 %. Pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja naik sebanyak 368.985 orang atau 61,30 % dari jumlah penduduk usia kerja 602.175 Orang (15 tahun ke atas), selanjutnya jumlah yang bekerja naik sebanyak 323.625 orang atau 38,70 %. Pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja naik sebanyak 388.184 orang atau 62,84 % dari jumlah penduduk usia kerja 617.746 Orang (15 tahun ke atas),

selanjutnya jumlah yang bekerja juga mengalami kenaikan menjadi 350.191 orang atau 37,16 %. Pada tahun 2006 diperkirakan jumlah angkatan kerja naik sebanyak 410.666 orang atau 64,65 % dari jumlah penduduk usia kerja 635.211 Orang (15 tahun ke atas), dan selanjutnya jumlah yang bekerja juga mengalami kenaikan menjadi 369.854 atau 53,74 %. Kenaikan jumlah angkatan kerja dan yang bekerja setiap tahun jika diamati dan diurutkan menurut lapangan usaha yang banyak ditekuni oleh penduduk yang bekerja pada 3 sektor lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap lapangan kerja, yakni sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama tempat bekerja penduduk Provinsi Gorontalo pada tahun 2005 yaitu sekitar 52,55 % kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar 15,88 %, jasa 13,33 % sedangkan sebesar 31,57 persen tenaga kerja lainnya terserap pada lapangan kerja pertambangan, listrik, gas, air, bangunan, industri pengolahan, angkutan dan keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas, hal ini akibat dari keberhasilan pelaksanaan 3 program unggulan yang digalakan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu pula akibat pelaksanaan program dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi melalui program antara lain program pengembangan kesempatan kerja, program peningkatan kualitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Data angkatan kerja, tenaga kerja yang bekerja, pengangguran dan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III-7. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Provinsi Gorontalo 2002 – 2006

Uraian	2002	2003	2004	2005	2006*
<b>Angkatan Kerja</b>	329.358	347.365	368.985	388.184	410.666
Bekerja	285.966	312.882	323.625	350.191	375.534
Pengangguran	43.392	34.483	45.360	37.993	36.383
Penduduk Usia 15+	568.836	581.763	602.175	617.746	635.211

Sumber : BPS Gorontalo (2006)

\* Angka proyeksi

Kondisi kesehatan masyarakat Gorontalo mengalami perbaikan hal ini ditandai dengan tingkat kematian bayi pada tahun 2002 berjumlah 23,50/1000 kelahiran hidup, pada tahun 2003 tingkat kematian bayi tetap berjumlah 23,50/1000 kelahiran hidup, lebih lanjut pada tahun 2004 tingkat kematian bayi menurun menjadi 21,10/1.000 kelahiran hidup dan tahun 2005 tingkat kematian bayi masih berjumlah 21,10/1000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2006 diperkirakan tingkat kematian bayi menurun menjadi 18,70/1000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dari tingkat kematian bayi target Indonesia Sehat 2010 yaitu sebesar 40/1000 kelahiran hidup.

Seiring dengan itu kualitas kesehatan ibu melahirkan semakin meningkat. Oleh karena perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, adanya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan digalakkannya program Suami Siap Antar Jaga (SIAGA). Pada tahun 2002 angka kematian ibu melahirkan sebesar 326/100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2003 angka kematian ibu melahirkan menurun menjadi 307/100.000 kelahiran hidup, selanjutnya pada tahun 2004 angka kematian ibu melahirkan turun menjadi 218/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2005 angka kematian ibu melahirkan naik menjadi 307/100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan karena penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, tingkat pendapatan penduduk yang masih rendah dan pola penyakit yang selalu berubah serta kemampuan pemerintah daerah dalam pendanaan kesehatan belum optimal. Pada tahun 2006 angka kematian ibu melahirkan diperkirakan turun menjadi 225/100.000 kelahiran hidup. Angka ini sama jika dibandingkan angka nasional yang mencapai 225/100.000 kelahiran hidup.

Keberhasilan bidang kesehatan lainnya sebagai pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo antara lain Pelaksanaan Program Lingkungan sehat, perilaku sehat dan

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada Penduduk yang menggunakan air bersih sehat di perkotaan maupun dipedesaan pada tahun 2002 Persentase Keluarga yang memiliki Akses Air Bersih sebesar 39.84 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 75.85 %, sedangkan Tempat-tempat Umum dan Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2002 sebesar 75,4 %, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 78% walaupun terjadi peningkatan namun masih dibawah Target Nasional yaitu untuk Penduduk yang menggunakan akses air bersih sebesar 80 % dan Persentase tempat-tempat umum yang sehat sebesar 80 %. Hal disebabkan oleh Kebiasaan Masyarakat mengkonsumsi Air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, ini umumnya terjadi pada masyarakat Pedesaan. dan Kurangnya kepedulian Pengelola Tempat - Tempat Umum dan Pengolahan makanan dalam hal persyaratan hygiene Sanitasi TTU-TPM.

Selanjutnya hasil Pelaksanaan Program Perilaku sehat dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2002 Masyarakat ditatanan rumah tangga yang melakukan hidup bersih dan sehat masih sekitar 53.64 % dari seluruh rumah tangga yang ada, pada tahun 2005 meningkat menjadi 54.02%, Penyebaran Informasi tentang kesehatan untuk Provinsi Gorontalo melalui Radio, Koran Lokal, dan TV Lokal, itu pun belum mencakup semua Program, disamping itu untuk Provinsi Gorontalo masih Perlu adanya Pelatihan-pelatihan untuk Tenaga Penyuluh Kesehatan Baik yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun di Puskesmas, Sarana Pendukung Penyuluhan Kesehatan belum memadai sampai ke tingkat Puskesmas, dan belum adanya Mobil Unit Penyuluhan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, serta Provinsi Gorontalo belum mempunyai Studio Mini guna mendukung Pengembangan Prototype media lokal Promosi Kesehatan.

Lebih lanjut hasil pelaksanaan program upaya kesehatan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sampai dengan tahun 2006 Jumlah Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo ada 5 Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 Rumah Sakit Khusus Kusta, yang telah terakreditasi 2 Rumah sakit Umum Daerah, disamping itu 3 Rumah Sakit masih dalam tahap Pembangunan.
- b. Telah dilaksanakan berbagai upaya pemberantasan penyakit menular untuk dapat menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular antara lain adalah
  - 1) Kasus Malaria pada tahun 2002, sebanyak 15.6 / 1.000 Penduduk, pada tahun 2003, turun menjadi 15.3 / 1.000 Penduduk, selanjutnya pada Tahun 2004 menurun menjadi 14,9 dan pada Tahun 2005 menurun menjadi 14.5 / 1.000 penduduk, selanjutnya pada tahun 2006 diperkirakan menurun menjadi 14,1 / 1000 penduduk, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Target Indonesia Sehat 2010 Sebesar 5 / 1.000 Penduduk ini disebabkan Karena Daerah Gorontalo adalah Daerah Endemis Malaria.
  - 2) Kasus Demam Berdarah (DBD) dari Tahun 2002 sebesar 0.13 / 100.000 Penduduk, pada tahun 2003 Meningkat 4.61 / 100.000 Penduduk, pada tahun 2004 menurun menjadi 1.61 / 100.000 Penduduk sedangkan pada Tahun 2005 terjadi peningkatan kasus DBD sebesar 24.02 / 100.000 Penduduk, ini disebabkan oleh Provinsi Gorontalo merupakan Daerah Transisi sehingga Kasus DBD cepat menyebar sehingga Pada Tahun 2005 Kasus Demam berdarah di Provinsi Gorontalo dinyatakan Sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), disamping itu Kondisi Lingkungan mendukung untuk Perkembangbiakan Nyamuk Aedes Aegypti sebagai Agen. Pada tahun 2006 kasus demam berdarah diperkirakan menurun menjadi 6 / 100.000 penduduk.

- 3) Prevalensi HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo ditemukan Kasus 2 Orang (0.4 %) pada Tahun 2004 dan pada Tahun 2005 di temukan 9 Kasus HIV/AIDS (1.4 %). Dari 9 orang yang dinyatakan menderita HIV/AIDS 1 orang telah meninggal, angka ini didapat dari hasil pelaksanaan Sero Survei terhadap Kelompok Resiko Tinggi (PSK, Sopir, dll). Dengan jumlah Sampel pada tahun 2004 Sebesar 500 Sampel dan Tahun 2006 sebesar 800 Sampel. Angka Pada Tahun 2004 masih dibawah target Nasional yaitu 0.9 % Namun pada tahun 2005 meningkat melampaui target nasional.
- 4) Telah ditingkatkan upaya surveilance epedimiologi untuk dapat melakukan tindakan dini terhadap kejadian luar biasa.
- 5) Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) terjadi Peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 62 %, pada tahun 2001 meningkat menjadi 61 % tahun 2002, 65 % pada tahun 2003, 67 % pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 70 %. Pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 75 %, Angka ini masih dibawah dari target Nasional yaitu sebesar 100 % pada tahun 2010. Rendahnya Capaian Desa UCI Provinsi Gorontalo disebabkan karena Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan tentang pentingnya Imunisasi, Kurangnya ketersediaan Logistik untuk kegiatan Imunisasi, Kurangnya Motivasi Petugas Juru Imunisasi untuk melaksanakan sweeping Imunisasi. Adapun yang menjadi Indikator Desa UCI adalah Cakupan Imunisasi Campak.
- 6) Selain itu ditingkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar serta penunjangnya.

Sedangkan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat berupa prevalensi Gizi Buruk pada Balita Pada Tahun 2001 Sebesar 17.9 %, Pada tahun 2002 terjadi Penurunan Manjadi 17.1 %, namun pada tahun 2003 terjadi peningkatan menjadi

21.01 %, tahun 2004 terjadi Penurunan menjadi 9.1 % dan tahun 2005 turun menjadi 8.1 % serta tahun 2006 diperkirakan turun menjadi 7,9 %.

Program sumberdaya kesehatan hasil yang telah dicapai antara lain sebagai berikut :

- a. Proporsi tenaga dokter pada tahun 2002 Rasio dokter terhadap jumlah penduduk sebesar 12.2 / 100.000 Penduduk meningkat menjadi 14.81 / 100.000 Penduduk, namun pada tahun 2003 menurun 13.11 / 100.000 Penduduk pada tahun 2004 sedang pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 15.1 / 100.000 Penduduk. Tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi 17 / 100.000 penduduk
- b. Proporsi tenaga dokter Spesialis dari tahun 2002 sebesar 1.0 / 100.000 Penduduk meningkat menjadi 2.36 / 100.000 Penduduk, namun pada tahun 2003 menurun 2.19 / 100.000 Penduduk pada tahun 2004 sedang pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 2.5 / 100.000 Penduduk. Pada tahun 2006 diperkirakan meningkat menjadi 3 / 100.000. penduduk

Perincian capaian dari indikator kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-8. Matriks Capaian Indikator Kesehatan 2002-2006

No	INDIKATOR KERJA	TARGET INDONESIA SEHAT 2010	PENCAPAIAN TAHUN				
			2002	2003	2004	2005	2006*
<b>MORTALITAS/ANGKA KEMATIAN</b>							
1	Angka Kematian Bayi	40 / 1.000	23.50	23.50	21.10	21.10	18,70
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kelahiran Hidup 150 / 100.000	326.00	307.00	218.00	307.00	225
3	Angka Harapan Hidup	Kelahiran Hidup 67,9	63.00	64.20	64,50	65,40	65
<b>MORTALITAS/ANGKA KESAKITAN</b>							
1	Angka Kesakitan Malaria	5 / 1.000 Pnddk	15.6	15.3	14.9	14.5	14,1
2	Angka Kesembuhan Penderita TB & BTA+	85 %	93.6	94.2	94.6	100	100
3	Prevalensi HIV	0,90 %	0	0	0.4	1.4	1
4	Angka Acute Flacid Paralysis	2/100.000 Anak	1,94	1.94	3.10	5.05	3
5	Angka Kesakitan Demam Berdarah	2/100.000 Pnddk	0.13	4.61	1.61	24.02	6
<b>STATUS GIZI</b>							
1	Presentasi Balita dengan Gizi Buruk	15 &	17.1	21.01	9.1	8.1	7,9
2	Presentase Tempat-tempat umum Sehat	80 %	75.4	75.8	76	78	90
<b>PERILAKU HIDUP MASYARAKAT</b>							
1	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65 %	53.64	53.75	53.91	54.02	60
2	Persentase Posyandu Purnama Mandiri	40 %	11.85	12.13	12.59	14.63	20
3	Persentase Keluarga yang memiliki Akses Air Bersih	80 %	39.84	39.95	40.1	75.85	85
<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>							
1	Persentase Desa Mencapai "Universal Chil"	100 %	62	65	67	70	75
2	Persentase Desa yang terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam	100 %	100	100	100	100	100
3	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100 %	100	100	100	100	100
<b>SUMBER DAYA KESEHATAN</b>							
1	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	40	12.2	14.81	13.11	15.1	17
2	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	6	1.0	2.36	2.19	2.5	3
3	Rasio Puskesmas Per Penduduk	1 / 30.000 Penduduk	1.6	1.79	1.66	1.8	2

Sumber : BPS untuk Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo (2006)  
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo  
Tahun 2006 BAPPEDA Provinsi Gorontalo

Selanjutnya dalam menunjang keberhasilan sasaran Program bidang kesehatan, beberapa output dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2002 - 2006 antara lain; terlatihnya 100 orang perawat terlatih dalam melaksanakan asuhan keperawatan bagi masyarakat tani dan nelayan, tersedianya kebutuhan Obat untuk Pos Obat Tani dan Nelayan, terlaksananya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader pos obat desa tani dan nelayan, terlaksananya 100 anak balita tani dan nelayan memperoleh makanan tambahan, tersedianya alat timbangan Dacin untuk Posyandu, tersedianya 40 orang petugas kesehatan memahami SKPG, teridentifikasinya kasus Polio, Diare, P2B2 dan campak, dipahaminya bahaya penyalahgunaan narkoba, & HIV/AIDS, terlatihnya 30 orang petugas kesehatan memahami program dalam upaya eliminasi kusta, terlaksananya pendistribusian vaksin sesuai kebutuhan kab / kota, tersosialisasinya PHBS, terlaksananya pertemuan kemitraan lintas sektor, terlaksananya Diklat petugas promosi kesehatan, terlatihnya 40 Kader Kesehatan, terlaksananya Bimtek program ke Kab/Kota, terlatihnya 40 orang petugas kesehatan dan lintas sektor dalam pengarusutamaan gender bidang kesehatan, terlaksananya advokasi dan sosialisasi program pengobatan tradisional, terlatihnya 24 petugas hygiene & sanitasi TPM, tersedianya data sanitasi dasar, terlaksananya sosialisasi program gizi masyarakat untuk 58 orang, tersedianya data status gizi balita & cakupan garam beryodium, terlaksananya kegiatan pembelajaran penanggulangan GAKY untuk 8 orang, terlaksananya 3 paket penyuluhan & penyebaran informasi gizi, terlatihnya 30 petugas gizi ttg manajemen laktasi, terlatihnya petugas gizi ttg penanganan anemi gizi, tersedianya kebutuhan sarana perpustakaan kesehatan terlaksananya sosialisasi kepada 30 orang yang memiliki jabatan struktural & fungsional tenaga kesehatan, terlaksananya pertemuan penyusunan perencanaan antara petugas provinsi & petugas kab/kota kepada 22 orang, terlaksananya

pertemuan koordinasi & evaluasi program sumber daya kesehatan, 8 orang tenaga kesehatan mendapatkan bantuan beasiswa, terlaksananya pembinaan petugas pelaksanaan program tugas belajar untuk 5 kab./kota, Terlaksananya pembinaan institusi pendidikan kesehatan, tersedianya ruang kelas program D III Kebidanan & Gizi, tersedianya alat lab prodi gizi, terlaksananya 28 sarana monitoring pengelolaan NAPZA di apotek dan RS, terlatihnya 25 dokter PKM ttg penggunaan obat tradisional, terlatihnya 25 perawat PKM ttg penggunaan obat rasional, terlaksananya pertemuan pengelola program farmasi, GFK, IFRS dan apotek & sosialisasi TPOP terdiri dari 64 orang, terlaksananya pembinaan kepada 48 petugas pengelola Obat di Puskesmas, tersusunnya rencana kerja program pembangunan kesehatan, terlatihnya 48 petugas pengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan kab/kota, terlaksananya pertemuan pemutakhiran data yang terdiri dari 36 orang, tersedianya profil kesehatan, tersedianya dokumen perencanaan, Tersedianya dokumen perencanaan kesehatan.

Dalam rangka membangun kemandirian masyarakat dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, pada tahun 2004 lahir PERDA No. 6 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Mandiri (BAPELKESMAN) Provinsi Gorontalo. Instansi ini pada tahap awal mempunyai program kegiatan sosialisasi kepada pihak legislatif dan eksekutif, organisasi masyarakat dan organisasi sosial, yaitu promosi JPKM 200 orang dan Advokasi 250 orang, pengobatan/pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat terpencil sebanyak 12.000 orang, bekerjasama dengan KKIG Makasar melaksanakan operasi bibir sumbing sebanyak 97 orang, operasi tumor sebanyak 75 orang, operasi gondok sebanyak 18 orang, operasi katarak sebanyak 80 orang, khitanan massal 463 orang dan pengobatan gigi tambal dan pencabutan sebanyak 6000 orang, operasi kecil dan pelayanan kesehatan lain, bekerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo dalam rangka pelayanan kesehatan,

operasi bibir sumbing dan operasi mulut. Pada saat ini telah tercatat 400 orang masyarakat sebagai anggota jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Target tahun 2006 adalah 1500 orang peserta jaminan pemeliharaan yang akan ditingkatkan terus sehingga seluruh masyarakat Gorontalo akan terjamin pemeliharaan kesehatannya.

## **B. Kinerja Keuangan**

### **1. Reformasi Keuangan Daerah**

Sebagai Provinsi yang baru berpisah dengan provinsi induk, pemerintah daerah ini hanya memiliki potensi, sedangkan prasyarat lainnya berupa personil dan peralatan daerah sangat terbatas. Demikian kondisi yang dihadapi Gubernur setelah resmi dilantik sebagai Gubernur, pada akhir Desember 2001 yang lalu. Pada saat itu pulalah diketahui bahwa Pemerintah Gorontalo tidak memiliki Neraca Daerah seperti halnya yang lazim ada pada sektor swasta. Dengan demikian tentu sangat menyulitkan Gubernur dalam menyiapkan kebijakan publik.

Sungguh luar biasa, pemerintah provinsi hanya memiliki suatu catatan tentang realisasi dari APBD pada saat itu. Satu lembaran kertas besar yang dimaksudkan sebagai catatan kekayaan Pemerintah Provinsi. Mana mungkin dapat Gubernur bersama seluruh jajarannya mampu merumuskan kebijakan publik jika hanya mengandalkan suatu informasi keuangan yang begitu minim. Inilah kenyataan, fakta, yang dihadapi Gubernur, gap antara pengalaman mengelola puluhan ribu karyawan di sektor swasta pada puluhan perusahaan dengan mengelola seperangkat satuan kerja birokrasi di pemerintahan. Desentralisasi memaksa kami harus mampu berinovasi dengan segala sumber yang ada. Kami harus dapat berkreasi, ada atau tidak pedoman yang dikeluarkan pemerintah Pusat untuk itu.

Secara kronologis perjalanan reformasi keuangan pada pemerintah provinsi ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

#### **Tahun 2001:**

Langkah awal yang dilakukan Gubernur Gorontalo adalah berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat melalui Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara di Manado, dan meminta dilakukan inventarisasi fisik atas aset-aset yang dimiliki dan untuk dibantu menyusun Neraca Awal Daerah. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah memiliki Neraca Daerah per 31 Desember 2001.

#### **Tahun 2002**

Untuk menyadarkan aparat provinsi tentang tuntutan perubahan jaman, sosialisasi terus-menerus dilakukan seperti mengundang Tim Sosialisasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Selanjutnya disadari dan diakui bahwa penerapan AKIP dan penyusunan Neraca Awal Daerah per 31 Desember 2001 belum mengikuti prosedur akuntansi yang benar, karena proses pencatatan dan pembukuan masih didasarkan MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang masih menganut Cash Basis dan Single Entry. Untuk itu langkah berikutnya adalah mengundang Tim Pengembangan Sistem dan Standar Akuntansi Daerah BPKP untuk melakukan sosialisasi dan asistensi. Kemudian disadari bahwa mustahil Provinsi Gorontalo dapat menerapkan sistem akuntansi dan keuangan daerah yang baik, jika tidak dibantu tenaga akuntan yang profesional atau minimal tenaga akuntansi. Untuk itu sekali lagi Gubernur melakukan permohonan bantuan kepada BPKP untuk dipinjamkan atau diperbantukan beberapa tenaga akuntan yang akan membidani reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan telah diterbitkannya Kepmendagri

No 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 dan 108 Tahun 2000, Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo telah berhasil membuat Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan payung hukum atas seluruh pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun ini juga telah diterapkan secara sistematis, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang dilaksanakan secara paralel dengan sistem MAKUDA, dimana pencatatan di masing-masing unit kerja masih menggunakan MAKUDA, sedangkan di Biro Keuangan dilakukan konversi untuk penerapan sistem akuntansi. Untuk itu tahun 2002 tersebut adalah merupakan masa transisi. Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, dibutuhkan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang handal di bidang kauntansi dan keuangan. Namun yang dimiliki adalah pegawai yang hanya berpengalaman sebagai bendaharawan dan mempunyai disiplin ilmu non keuangan. Dengan keterbatasan tersebut untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM dilakukan beberapa cara, yaitu:

- Membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga-tenaga honorer yang berlatar pendidikan sarjana akuntansi dan keuangan yang dilatih untuk ikut mengerjakan dan mengembangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Melaksanakan pelatihan di kantor sendiri (PKS) secara rutin terhadap pegawai-pegawai tentang pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

### **Tahun 2003:**

Dalam rangka pengembangan kapasitas SDM yang berkelanjutan, maka dibuat Memorandum Kesepakatan (MoU) tanggal 29 April 2003 dengan pihak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan-RI dalam penyelenggaraan pendidikan bagi

pegawai pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo dengan mengadakan pendidikan D-III Spesialisasi Akuntansi dan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan kuliah untuk angkatan pertama dapat direalisasikan pada tanggal 30 Juli 2003, dari hasil seleksi bagi pegawai terpilih sebanyak 35 orang. Dan sampai dengan saat ini telah telah menghasilkan lulusan D-III STAN yang telah diwisuda sebanyak 70 orang, serta 39 orang lagi sedang penyelesaian tahap akhir perkuliahan, yang direncanakan pada bulan September 2006 ini akan diwisuda.

Dalam hal penyusunan anggaran, untuk tahun 2003 kami telah berhasil menyusun dan menerapkan manajemen kinerja yang berbasis pada apa yang diinginkan oleh stakeholders, atau alokasi anggarannya merupakan fungsi dari kinerja yang ditawarkan akan dicapai oleh pengguna anggaran, yang dalam proses penyusunannya cukup membuat semua pihak berusaha untuk mengukur dan meningkatkan kinerja masing-masing. Reformasi pengelolaan keuangan daerah yang telah menghasilkan Laporan Keuangan tahun 2002, untuk pertama kalinya diaudit BPK-RI pada triwulan pertama tahun 2003. Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Tahun 2002 memperoleh penilaian **Wajar Tanpa Pengecualian**, Laporan Keuangan Tahun 2002 tersebut adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah disetujui DPRD Provinsi Gorontalo. Dengan memperoleh Opini ini, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah provinsi telah berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu juga membuat kebanggaan tersendiri bagi Pemerintahan Provinsi, khususnya para Pengelola Keuangannya.

Demikian pula untuk tahun tahun berikutnya, hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 serta Laporan Keuangan Tahun 2005 yang telah diaudit dan mendapat pernyataan opini dari BPK-RI dengan **Wajar Tanpa Pengecualian**.

**Tahun 2004:**

Pada tahun 2004 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan keuangan, fungsi pengelola keuangan disempurnakan dengan melakukan perubahan total strukturnya, dimana terjadi penggabungan dua satuan kerja yang memiliki fungsi menyatu, yaitu Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan menjadi Badan Keuangan. Disamping itu telah diterapkan anggaran berbasis kinerja, maka pengelolaan keuangan juga membuat terobosan dalam rangka meningkatkan kinerja, yaitu membuat kebijakan mengadakan insentif berupa Tunjangan Kinerja Daerah.

Dalam rangka peningkatan SDM aparatur, pada level pengambilan kebijakan, Gubernur Gorontalo pada tanggal 5 November 2004 telah melakukan kesepakatan/kerjasama dengan Rektor Universitas Gadjah Mada, dibidang pendidikan pasca sarjana dengan konsentrasi Keuangan Daerah. Untuk angkatan pertama direalisasi sebanyak 36 orang yang berasal dari karyawan di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Tahun 2005:**

Pada tahun 2005 terjadi perubahan disana sini dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perubahan tersebut membawa konsekuensi kepada peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Untuk menerapkan sepenuhnya ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi telah berhasil menetapkan perubahan OTK pada 18 SKPD yang diberi kewenangan desentralisasi keuangan, yaitu dengan membentuk satuan pengelola keuangan yang dipimpin seorang pejabat eselon III. Hal ini merupakan terobosan yang sangat penting dilakukan agar membantu percepatan pelayanan di bidang keuangan.

**Tahun 2006**

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kita menyempurnakan & menetapkan Peraturan Nomor 03 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah

Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan pada tahun 2006 ini juga, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dicoba mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006

## **2. Data Kinerja Keuangan**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur yang dipertanggungjawabkan kepada DPRD Provinsi Gorontalo semenjak Provinsi ini diresmikan telah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LKPJ tersebut dilengkapi dengan Laporan Keuangan, yang terdiri atas Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun **laporan pertanggungjawaban (LPJ)** tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2001 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perhitungan APBD TA 2001.
- Tahun anggaran 2002 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Perhitungan APBD TA 2002.
- Tahun anggaran 2003 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perhitungan APBD TA 2003.
- Tahun anggaran 2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2004.
- Tahun anggaran 2005 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2005.

Sejak tahun anggaran 2002, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo telah dilakukan audit oleh BPK-RI, dan setiap tahun mendapat opini **Wajar Tanpa Pengecualian.**

Perjalanan Provinsi sejak tahun 2001, kinerja keuangan dapat digambarkan pada tabel - tabel berikut:

Tabel 1 Pendapatan Asli Daerah

### **C. Analisis Perkembangan Pembangunan 2001 dan 2002**

Tinjauan tentang tata pemerintahan yang amanah (good governance) mengacu pada aspek fungsional pemerintah. Yaitu dengan menganalisis apakah pemerintah telah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bersama sesuai dengan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah dan pendek.

Berdasarkan pengukuran kinerja kelembagaan Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya pengaruh program dan kegiatan yang signifikan terhadap perkembangan berbagai bidang baik pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya dan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan analisis perkembangan pembangunan Gorontalo tahun 2001 dan 2006.

#### **1. Bidang Pemerintahan**

Sejak tahun 2002 Pemerintrah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan telah menerapkan manajemen kewirausahaan atau New Public Management (NPM), yang lebih menekankan pada pencapaian hasil dan akuntabilitas dalam menjamin pemanfaatan anggaran publik secara efektif dan efisien, dan merupakan sarana membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat krisis multidimensi sejak tahun 1997 hingga awal 2001.

Berbagai instrumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditata kembali agar mampu menghasilkan kinerja optimal.

Analisis kinerja bidang pemerintahan terbagi ke dalam enam aspek yang meliputi wilayah administrasi, struktur kelembagaan, kepegawaian, dokumen daerah, anggaran pembangunan serta sarana dan prasarana pemerintah.

#### a. Wilayah Administrasi

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan dan perkembangan aspirasi masyarakat di daerah, wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Gorontalo terus berkembang baik dari sisi jumlah kabupaten maupun kecamatan dan desa/kelurahan. Pemekaran wilayah kabupaten/kota disamping untuk memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat dan tata ruang provinsi juga dikarenakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dimana persyaratan provinsi minimal memiliki 5 kabupaten/kota.

Tabel III-9. Perkembangan Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2001 dan 2006.

Wilayah Administrasi	Tahun		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Kabupaten/Kota	3	5	66,67
Kecamatan	21	47	123,81
Desa/Kelurahan	372	497	33,60

Sumber : - BPS Provinsi Gorontalo (2006)  
- Data olahan Bappeda Provinsi Gorontalo (2006)

Tabel diatas menunjukkan adanya perkembangan jumlah wilayah administrasi yang meliputi Kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango serta Kabupaten Boalemo dimekarkan menjadi Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Prosentase

pemekaran dua kabupaten menambah wilayah administrasi Provinsi Gorontalo sebesar 66,67 %. Sementara untuk pemekaran kecamatan dari 21 menjadi 47 kecamatan atau naik sebesar 123,81 %. Sedangkan untuk desa/kelurahan mengalami kenaikan sebesar 33,60 % yakni dari 372 menjadi 497 desa/kelurahan.

Tabel III-10. Perkembangan Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Wilayah Administrasi	Tahun		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Kota Gorontalo :			
- Kecamatan	3	6	100
- Desa/Kelurahan	45	46	0,22
Kabupaten Gorontalo :			
- Kecamatan	13	17	30,77
- Desa/Kelurahan	232	200	(13,79)
Kabupaten Boalemo :			
- Kecamatan	5	7	40
- Desa/Kelurahan	95	89	(6,32)
Wilayah Administrasi	Tahun		Kenaikan (%)
	2004	2006	
Kabupaten Pohuwato:			
- Kecamatan	5	7	40
- Desa/Kelurahan	72	72	-
Kabupaten Bone Bolango :			
- Kecamatan	4	10	150
- Desa/Kelurahan	63	90	42,86

Sumber : - Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo (2006)  
 - Hasil olahan Bappeda Provinsi Gorontalo (2006)

#### b. Struktur Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menuntut ruang partisipasi yang lebih luas dalam proses kebijakan publik, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo secara bertahap melakukan penataan struktur kelembagaan termasuk aspek-aspek penunjangnya. Hal ini sejalan dengan implementasi New Public Management melalui penerapan manajemen kewirausahaan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang aspek kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan proses pengembangan ekonomi daerah merupakan penentu penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi pemerintah daerah ditata ulang berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan penajaman fungsi perangkat daerah agar unit-unit pemerintah daerah mampu berkinerja baik dan menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas penataan diarahkan agar Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki watak kewirausahaan.

Lembaga-lembaga yang menangani keuangan dan kepegawaian ditata kembali agar berkinerja baik, karena fungsi keuangan dan kepegawaian merupakan inti dari kapasitas manajemen pemerintah daerah. Kemudian penataan ini diperluas sampai menyentuh struktur kelembagaan Badan/Dinas lainnya. Upaya yang dilakukan antara lain :

- 1) Penggabungan Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- 2) Merubah Biro Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat (BKD Diklat). Institusi ini didedikasikan sebagai lembaga yang mampu memfasilitasi potensi dan kreativitas pegawai daerah untuk berkinerja maksimal.
- 3) Membentuk badan/dinas yang dianggap penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat (dekonsentrasi) serta pemenuhan kebutuhan pembangunan berdasarkan inisiatif dan kewenangan daerah otonom (desentralisasi).

- 4) Pembentukan Badan Pelaksana Kesehatan Mandiri (BAPELKESMAN). Melalui studi dan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya dihasilkan terobosan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat miskin di Gorontalo dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik. Bapalkesman merupakan institusi yang menyelenggarakan fungsi tersebut.
- 5) Membentuk Organisasi Tata Kerja (OTK) bidang keuangan (Eselon III) sebagai wujud pelimpahan kewenangan keuangan dari Kepala Daerah (Gubernur) kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas badan/dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dimilikinya.
- 6) Implementasi *zero red tape* yaitu meniadakan hambatan birokrasi.

Tabel III-11. Perkembangan Struktur Kelembagaan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Struktur Kelembagaan	Tahun		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Asisten	2	3	50,00
Biro	6	7	16,67
Dinas	9	12	33,33
Badan	3	9	200,00
Sekretariat	1	1	0
Kantor	-	2	100
Balai	-	1	100

Sumber : - Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo (2006)  
 - Hasil olahan Bappeda Provinsi Gorontalo (2006)

Disamping badan/dinas daerah, jumlah instansi instansi vertikal yang membantu pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di Provinsi Gorontalo turut mengalami perkembangan. Pada tahun 2001 instansi vertikal berjumlah limabelas instansi, yang terdiri atas enam instansi yang didirikan bersamaan dengan pembentukan provinsi dan sembilan instansi yang memang sudah ada sebelumnya.

Seiring dengan makin tingginya aktivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang menuntut perluasan tugas, fungsi, dan kewenangan maka sejak tahun 2002 jumlah instansi vertikal di daerah terus bertambah. Pada tahun 2006 tercatat jumlahnya mencapai 23 instansi, atau meningkat sebesar 53,33 %.

### **c. Kepegawaian**

Kepegawaian merupakan aspek penting yang perlu dibenahi dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan daerah. Di bidang kepegawaian, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang cukup radikal. Reorientasi pola pikir dan budaya kerja pegawai dilakukan melalui *Mind Setting* dan *Strategic Breakthrough* dari tingkat pejabat Eselon II hingga staf. Bahkan saat ini sudah berjalan ditingkat Kepala Sekolah. Konsep pengembangan pegawai diarahkan agar pegawai itu inovatif, mampu bekerja secara *team work*, dapat dipercaya, mampu bekerja dengan cepat dan akurat serta dapat menciptakan kemakmuran daerah. Terobosan yang dilakukan adalah menciptakan 5 Nilai Budaya Kerja untuk membangun *entrepreneurial spirit* dalam birokrasi pemerintahan yang mengutamakan pada; *innovation, team work, trustworthiness, prosperity* dan *speed*. Ini adalah inovasi pertama yang dilakukan

oleh pemerintah provinsi di Indonesia, yakni menciptakan semacam *corporate culture* dalam pemerintahan seperti yang ada pada sektor swasta.

Disamping itu, ketersediaan (jumlah) aparatur yang memadai turut mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka setiap tahun Pemerintah Provinsi Gorontalo mengangkat pegawai melalui pengisian formasi PNS daerah.

Tabel III-12. Perbandingan PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo

Golongan	Jumlah PNS		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Golongan IV	52	203	290,38
Golongan III	280	937	234,64
Golongan II	167	368	120,36
Golongan I	3	13	333,33
Jumlah	502	1.521	244,68

Sumber : BKD Dan DIKLAT Provinsi Gorontalo (2006)

Peningkatan kuantitas SDM aparatur di iringi pula dengan peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Tabel III-13. Perbandingan Kualifikasi SDM Aparatur Provinsi Gorontalo

Golongan	Jumlah PNS		Kenaikan (%)
	2001	2006	
S3 (Doktor)	2	8	300
S2	27	164	507,41
S1	221	684	209,50
D III	33	115	248,48
D II	2	5	150
D I	5	43	760
SMA, SMP, SD	212	503	137,26
<b>Total</b>	502	1.521	330,38

Sumber : BKD Dan DIKLAT Provinsi Gorontalo (2006)

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah PNS yang berkualifikasi S1 keatas berjumlah 856 orang atau mencapai 56,28 %, sedangkan D III hingga D I sebanyak 163 orang atau 10,72 %. Selebihnya adalah PNS berpendidikan SMA kebawah mencapai 33 %. Meski dari sisi kuantitas PNS belum memenuhi formasi kebutuhan pengisian jabatan dan staf, namun secara kualitatif (kapasitas keilmuan, pengalaman dan profesionalisme) kekurangan tersebut dapat dipenuhi, bahkan telah berhasil meningkatkan kinerja Pemerintahan Provinsi Gorontalo pada tahun 2006.

#### d. Dokumen Daerah

Penyelenggaraan roda pemerintahan serta dinamika perkembangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, membutuhkan landasan hukum dan operasional dalam bentuk dokumen daerah.

Tabel III-14. Perbandingan Jumlah Dokumen Daerah

Dokumen	Tahun		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Perda	2	119	5.850
Peraturan Gubernur	-	14	100
Keputusan Gubernur	243	1.608	561,73
Dokumen Perencanaan	3	89	2.866,67
Perjanjian Kerjasama	1	114	11.300
<b>Total</b>	249	1.944	680,72

Sumber : Hasil olahan Bappeda Provinsi Gorontalo (2006)

#### e. Anggaran Pembangunan

Terkait dengan peningkatan pelayanan publik, anggaran pembangunan Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun

menunjukkan perkembangan yang signifikan. Peningkatan anggaran pembangunan yang diiringi dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah disebabkan beberapa hal antara lain :

- 1) meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap sistem akuntansi keuangan daerah yang dijalankan.
- 2) meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur dalam pengelolaan keuangan.
- 3) meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dan keuangan daerah.
- 4) meningkatnya kebutuhan daerah sesuai aspirasi masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel III-15. Perbandingan Pendapatan APBD

Sumber Pendapatan	Jumlah	
	2001	2006
Pendapatan Asli Daerah :		
1. Pajak Daerah	6.961.541.865	43.044.890.710
2. Retribusi Daerah	192.040.125	-
3. Lain-lain PAD Yang Sah	609.299.765	1.145.000.000
4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	2.550.000.000
Dana Perimbangan :		
1. Bagi hasil pajak & bukan pajak	3.128.782.824	4.100.000.000
2. Dana Alokasi Umum	45.348.673.000	395.390.000.000
Lain-lain Penerimaan Yang Sah :		
1. Dana Kontingensi (ST)	20.000.000.000	-
2. Kontingensi P3D	803.250.000	-
3. Bantuan Provinsi Sulawesi Utara	100.000.000	-
4. Potongan TPP	552.622.361	-
<b>Total Pendapatan</b>	<b>77.696.211.940</b>	<b>442.229.890.710</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (2006)

Data diatas menunjukkan kenaikan pendapatan APBD Provinsi Gorontalo selang Tahun 2001 hingga 2006 mencapai 469,18 %.

Kenaikan ini diakibatkan oleh pergeseran naik struktur APBD dengan rata-rata kenaikan pendapatan mencapai 569,18 % dan PAD meningkat sebesar 618,32 %.

Sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN khususnya Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2001 baru mencapai Rp. 73.383.608.184 meningkat sebesar 238,44 % di tahun 2002 menjadi Rp. 248.360.896.000. Kemudian pada tahun 2003, 2004 dan 2005 angka ini terus mengalami peningkatan masing-masing tahun 2003 naik 69,09 % menjadi Rp. 419.965.713.631, tahun 2004 naik 4,02 % menjadi Rp. 436.864.263.313 dan tahun 2005 naik sebesar 77,04 % menjadi Rp. 773.422.984.261. Sedangkan pada tahun 2006, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencapai Rp. 1.026.964.668.000 atau naik sebesar 32,78 %. Berdasarkan data tersebut, rata-rata kenaikan APBN (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) pertahun mencapai 84,27 % atau mencapai Rp. 190.716.211.963 per tahun.

Kenaikan anggaran pembangunan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN yang diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaannya merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menerapkan prinsip Efektif dan Efisien dalam penganggaran. Hal ini menjadikan Gorontalo sebagai daerah penelitian Bank Dunia khususnya dalam penilaian pelaksanaan belanja publik pemerintah daerah melalui kegiatan Gorontalo Public Expenditure Analysis And Capacity Harmonization (PEACH). Komponen Gorontalo PEACH yang secara khusus mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan belanja publik adalah Gorontalo Public Expenditure Analysis (Gorontalo PEA). Gorontalo merupakan daerah yang ketiga di Indonesia yang dipilih untuk menjalankan program ini.

#### f. Sarana Dan Prasarana Pemerintah

Sarana prasarana Pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ini di akibatkan oleh meningkatnya volume kerja badan/dinas sebagai akibat dari makin meluasnya fungsi dan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu juga dikarenakan belanja dan jasa yang menambah jumlah barang modal milik pemerintah daerah.

Tabel III-16. Perbandingan Inventaris Pemerintah Provinsi Gorontalo.

No.	Kelompok perlengkapan/ Barang Inventaris	Jumlah		Trend (%)
		2001	2006	
1.	Tanah (persil)	2	35	1.650
2.	Bangunan (buah)	2	49	2.350
3.	Kendaraan Roda 2	66	142	115,15
4.	Kendaraan Roda 4	22	368	1.573

Sumber : Biro Umum Dan Perlengkapan Provinsi Gorontalo (2006)

Perbandingan data tahun 2001 dan 2006 menunjukkan dalam lima tahun barang inventaris berupa tanah, bangunan, kendaraan roda dua dan roda empat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1.650 % : 2.350 % : 115.15 % : 1. 573. Perbedaan jumlah antara persil tanah dan bangunan disebabkan adanya pembangunan dua atau lebih kantor dalam satu persil tanah, seperti Kantor Badan Pengawas Daerah dan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik. Data inventaris tanah yang dimiliki termasuk tanah yang berada di luar daerah sebanyak enam persil yang dimanfaatkan untuk asrama HPMIG Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Palu, Minahasa dan Malang serta kantor Badan Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta.

Disamping itu pula, jumlah badan/dinas yang telah memiliki kantor terus bertambah. Data badan/dinas yang telah memiliki sarana gedung

sebagai pusat pengelolaan administrasi dan operasional kelembagaan yang otonom adalah sebagai berikut.

Tabel III-17. Dinas/Badan Yang Memiliki Kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo

No.	Badan/Dinas	Tahun mulai menempati
1.	Sekretariat Daerah	2005
2.	DPRD	2006
3.	Badan Keuangan Daerah	2004
4.	Badan Pengawas Daerah	2002
5.	Badan Kesbang & Politik	2002
6.	BKD & DIKLAT	2005
7.	Badan Perwakilan Jakarta	2006
8.	Dinas PU Kimpraswil	2005
9.	Dinas Perhubungan, Postel & Pariwisata	2006
10.	Dinas Perikanan & Kelautan	2006
11.	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	2006
12.	Sekretariat DPRD	2006
13.	Perpustakaan Nasional	2005
14.	Arsip Nasional	2005

Sumber : Biro Umum Dan Perlengkapan Provinsi Gorontalo (2006)

Berdasarkan hasil penelitian “Governance Assessment, Developing a Diagnostic Tool and Its Application for Governance Reform oleh Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Gorontalo menempati posisi Pertama dalam Indeks Kualitas Tata Pemerintahan Menurut Provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Tata Pemerintahan Menurut Kabupaten, Pohuwato menempati posisi Kedua tertinggi setelah Kabupaten Blitar.

## 2. Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan telah menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti. Kebijakan bidang ekonomi yang difokuskan pada Tiga Program Unggulan yakni pengembangan SDM, pertanian dan perikanan telah membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan daerah.

Berikut ini akan digambarkan perkembangan indikator makro ekonomi dan peranan sektor pertanian, perdagangan dan industri dalam mengakselerasi percepatan ekonomi daerah.

#### a. Makro Ekonomi

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Gorontalo baru mencapai 5,38 % dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1,82 trilyun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 924,3 milyar. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi perkembangan ekonomi Gorontalo saat itu adalah dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Bahkan pada tahun 1998 ekonomi Indonesia berkontraksi hingga -2,16 %. Hal ini mengakibatkan pergerakan sektor-sektor ekonomi baik nasional maupun daerah berjalan lambat.

Tabel III-18. Perbandingan Indikator Makro Ekonomi

Indikator	Tahun		Kenaikan (%)
	2001	2006*	
Pertumbuhan Ekonomi	5,38	7,06	1,68 %
PDRB (Juta Rp)			
- AHB	1.822.824,30	3.386.865,92	85,80
- AHK	924.318,00	2.160.154	133,72
PDRB Per Kapita	2.161.642,27	3.723.246,33	72,24
Inflasi	9,23 %	0,80**	-
Investasi	Rp. 230 milyar	Rp. 2,239 Trilyun	873,48

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

\* Data per Desember 2005

\*\* Data per Juli 2006

Dengan digulirkannya kebijakan program dan kegiatan pembangunan melalui Tiga Program Unggulan dan infrastruktur penunjang, maka dari tahun ke tahun perkembangan indikator makro ekonomi menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan realitas di masyarakat, dimana pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 7,06 % dengan perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 3,39 milyar dan atas dasar harga

konstan mencapai Rp. 2,16 milyar. Hal ini telah memicu kenaikan PDRB per kapita masyarakat dimana pada tahun 2001 sebesar Rp. 2,16 milyar menjadi Rp. 3,72 milyar di tahun 2006. Berarti selang tahun 2001 hingga 2006 telah terjadi kenaikan sebesar 72,24 %.

#### **b. Pertanian**

Pembangunan pertanian dalam arti luas sebagai bagian dari Tiga Program Unggulan Daerah (pertanian dan perikanan) dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Provinsi Gorontalo menempati posisi tertinggi dengan nilai mencapai 30,75 % pada tahun 2002 dan 30,56 % tahun 2005.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB antara lain potensi, jumlah produksi, daya serap tenaga kerja, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian melalui kebijakan pengembangan pertanian dan etalase perikanan.

Perbandingan jumlah produksi tahun 2001 dan 2006 menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan untuk beberapa jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Kenaikan produksi pertanian tertinggi dialami oleh komoditi Jagung yang mencapai 389,53 % dari 81.720 ton tahun 2001 menjadi 400.046 ton tahun 2005. Sedangkan kenaikan produksi Beras baru mencapai 5,21 % dari 158.870 ton pada tahun 2001 menjadi 167.153 ton di tahun 2006.

Selanjutnya perkembangan komoditi perkebunan secara berturut-turut adalah Kemiri sebesar 792,73 % dari 553,92 ton tahun 2001 menjadi 4.945,03 ton tahun 2006, Kakao dari 816,36 ton menjadi 3.551,66 ton atau naik sebesar 335,06 %, Tebu dari 10.907 ton menjadi 13.078 ton, naik sebesar 19,90 %, Kelapa dari 61.308,36 ton menjadi 59.024,40 ton atau naik sebesar 3,87 %.

Tabel III-19. Perbandingan Produksi & Produktivitas Komoditi Pertanian dan Perkebunan

Komoditi	Jumlah Produksi		%	Produktivitas	
	2001	2006*		2001	2006*
Beras	158.870,00	167.153,00	5,21	44,58	42,74
Jagung	81.720,00	400.046,00	389,53	22,32	37,13
Kelapa	59.024,40	61.308,36	3,87	1,01	1,07
Tebu	10.907,00	13.078,00	19,90	3,79	4,76
Cengkeh	1.406,76	837,56	(40,46)	0,51	0,16
Kakao	816,36	3.551,66	335,06	0,45	0,52
Kemiri	553,92	4.945,03	792,73	0,15	0,94

Sumber : Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan dan Dinas Kehutanan & Perkebunan (2006)

\* Data sampai dengan Desember 2005

Berdasarkan hasil penelitian Badan pengawasan keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa Program Pengembangan Agropolitsn Berbasis Jagung di Provinsi Gorontalo telah berjalan efektif. Beberapa aspek yang mempengaruhi keberhasilan program adalah keorganisasian, keekonomian dan bimbingan teknis. Meski dengan sarana dan prasarana pertanian yang masih terbatas, namun tingkat produksi dan produktivitas pertanian tetap menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Hal lain yang turut mempengaruhi produksi adalah implementasi Limited Government Policy (kebijakan terbatas pemerintah) dalam pengaturan harga dasar jagung, dimana korelasi kenaikan produksi dengan pelaksanaan kebijakan menunjukkan signifikansi yang tinggi. Demikian halnya dengan pembangunan sejumlah akses jalan agropolitan hingga ke sentra-sentra produksi pertanian telah ikut menaikkan produksi pertanian.

Disamping pertanian, perikanan juga menjadi fokus pembangunan ekonomi Gorontalo. Melalui program Etalase Perikanan yang operasionalnya dilaksanakan oleh Manajemen Taksi Mina Bahari, perikanan telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada tahun 2001 tercatat jumlah nelayan mencapai 16.882 orang dengan tingkat pendapatan sebesar Rp. 292.557 per bulan, dan jumlah rumah tangga perikanan (RTP) budidaya mencapai 1.997 KK dengan pendapatan per bulan sebesar Rp. 282.597. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2001 baru mencapai 27.348,5 ton.

Untuk meningkatkan produksi perikanan, Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan kebijakan Taksi Mina Bahari (TMB) dengan mendirikan Unit Manajemen TMB yang diarahkan untuk memberikan pelayanan antara lain permodalan, penyediaan BBM, penyediaan es, perbengkelan/galangan kapal, penyediaan unit Toserba Nelayan, penanganan pemasaran hasil dan klinik bisnis.

Melalui kebijakan tersebut, produksi perikanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat jumlah produksi mencapai 55.073,3 ton atau naik sebesar 101,38 %. Sementara itu jumlah nelayan dan RTP budidaya juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 jumlah nelayan mencapai 17.369 orang dan RTP budidaya sebanyak 2.998 KK. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan pendapatan dimana tercatat nelayan sebesar Rp. 987.373 per bulan dan RTP budidaya sebesar Rp. 750.427 per bulan.

Tabel III-20. Perbandingan Jumlah Nelayan dan RTP Pembudidaya

Nelayan / RTP	Tahun		Trend (%)
	2001	2006	
Nelayan Tangkap :			
a. Perairan Laut	15.019	15.285	1,77
b. Perairan Umum	1.863	2.084	11,82
Jumlah	16.882	17.369	2,88
RTP Budidaya :			
a. Tambak	706	691	
b. Kolam	469	261	
c. Mina Padi	6	25	
d. Jaring Apung	315	666	
e. Karamba	29	568	
f. Rumput Laut	470	747	
g. KJA Laut	2	40	
Jumlah	1.997	2.998	50,12
Total	18.879	20.367	7,88

Sumber : Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Gorontalo (2006)

Seiring dengan peningkatan produksi, luas areal budidaya perikanan terus meningkat.

Tabel III-21. Perbandingan Luas Areal Budidaya Perikanan

Budidaya (Ha)	Tahun		Trend (%)
	2001	2006*	
Tambak	1.157,6	2.093,8	80,87
Kolam	83,0	63,6	(23,37)
Mina Padi	4,2	6,4	52,38
Jaring Apung	15,5	64,2	314,19
Karamba	720,0	3.400,0	372,22
Rumput Laut	121,4	269,3	121,83
KJA Laut	0,5	0,9	80
Total	2.101,6	5.897,8	180,63

Sumber : Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Gorontalo (2006)

Dampak pelaksanaan Tiga program Unggulan untuk sektor pertanian dan perikanan juga menjadi salah satu fokus penelitian Bank Dunia melalui Gorontalo Regional Economic Development (Gorontalo RED) yang merupakan komponen Gorontalo PEACH).

### c. Perdagangan Dan Industri

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tahun 2005 dan 2006 turut di pengaruhi oleh lalu lintas perdagangan dan industri di daerah. Jika pada tahun 2001 jumlah industri baru mencapai 89 industri dengan jumlah per golongan industri sebagai berikut. Makanan, minuman & tembakau sebanyak 50 industri atau 62,5 %, kayu & barang2 dari kayu termasuk furniture 20 industri atau 25 %, tekstil pakaian jadi dan kulit 15 industri atau 22,47 %, barang galian bukan logam kecuali minyak bumi 2 industri atau 2,25 % dan barang dari logam, mesin dan peralatannya 2 industri atau 2,25 %.

Tabel III-22. Perbandingan Jumlah Industri

Golongan Industri	Perusahaan		%
	2001	2006	
Industri makanan, minuman & tembakau	50	1.338	2.576
Industri kayu & barang2 dari kayu termasuk furniture	20	1.124	5.520
Industri tekstil pakaian jadi dan kulit	15	879	5.760
Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi	2	450	22.400
Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya	2	221	10.950
T o t a l	89	4.012	4.407,86

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan & PM Prov. Gtlo (2006)

Data diatas menunjukkan perkembangan industri di Gorontalo meningkat sangat pesat dengan nilai pertambahan mencapai 4.407,86 % dari 89 industri menjadi 4.012 industri. Peningkatan terbesar terjadi pada jumlah Industri barang galian bukan logam kecuali minyak bumi dari 2 menjadi 450 industri. Sedangkan perkembangan terendah dialami oleh Industri makanan, minuman & tembakau dari 50 industri menjadi 1.338 industri.

Seiring dengan perkembangan industri, ekspor Gorontalo juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2001, realisasi ekspor baru terbatas pada tujuh jenis komoditi yakni ikan kerapu 3.050 kg, ikan layang beku 190.000 kg, ikan tuna 23.000 kg, mutiara 9,25 kg, bungkil kopra 17.650.000 kg, minyak kelapa kasar 6.776.689 kg dan jagung kuning 6.300.000 kg.

Tabel III-23. Perbandingan Realisasi Ekspor Gorontalo

Jenis Komoditi/ Barang	Realisasi Ekspor (Kg)		Kenaikan (%)
	2001	2006	
Kayu gergajian	-	1.303.952,43	100
Ikan kerapu	3.050,00	1.500,00	(50,82)
Ikan layang beku	190.000,00	101.450,00	(46,60)
Ikan tuna	23.000,00	37.603,50	63,49
Mutiara	9,25	16,38	77,08
Bungkil kopra	17.650.000,00	32.208.729,00	82,49
Minyak kelapa kasar	6.776.689,00	31.736.000,00	368,31
Jagung kuning	6.300.000,00	35.960.000,00	470,79
Tepung kelapa	-	1.650.000,00	100
Gula tetes	-	5.000.000,00	100
Kapal survey	-	1.696.000,00	100

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan & PM Prov. Gtlo (2006)

Data diatas menunjukkan adanya kenaikan realisasi ekspor sembilan komoditi dan penurunan pada dua jenis komoditi. Kesembilan komoditi yang mengalami kenaikan ekspor adalah kayu gergajian mencapai 100 %, ikan tuna 63,49 %, mutiara 77,08 %, bungkil kopra 82,49 %, minyak kelapa kasar 368,31 %, Jagung kuning 470,79 %, tepung kelapa 100 %, gula tetes 100 % dan kapal survey 100 %. Sedangkan penurunan ekspor terjadi pada komoditi ikan kerapu yang mencapai -52,82 % dan ikan layang beku sebesar -46,60 %.

### **3. Bidang Sosial Budaya**

Pembangunan bidang sosial budaya mencakup pendidikan, kesehatan, tenaga kerja serta hukum, kemasyarakatan dan agama. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh dibidang sosial budaya telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang membawa Gorontalo bisa berdiri sejajar dengan daerah lainnya.

Analisis perkembangan bidang sosial budaya tahun 2001 dan 2006 akan diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu program unggulan daerah yang diarahkan untuk :

- 1) membangun kapasitas pendidikan masyarakat melalui perluasan kesempatan belajar, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan distribusi pendidikan yang berkeadilan.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan kapasitas pendidikan masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan program Pendidikan Berbasis Kawasan dengan tujuan antara lain mewujudkan lembaga pendidikan formal dan non formal yang efektif sebagai pusat pembangunan nilai, sikap dan kemampuan SDM, meningkatkan kualitas lulusan lembaga pendidikan, terwujudnya kualitas pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan mempersiapkan tenaga siap pakai.

Melalui pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pendidikan, Gorontalo telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Data tahun 2006 menunjukkan APK SD/MI sebesar 105 %, SMP/MTs 70,83 % dan SMA 47,67 %. Sedangkan APM SD/MI 89,08 %, SMP/MTs 55,42 % dan SMA/MA 36,46 %.

Penurunan APK dan APM jenjang pendidikan SD diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. keberhasilan pemerintah menekan angka usia sekolah SMP/MTs yang masih duduk di bangku SD melalui program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- b. meningkatnya jumlah anak usia SD yang duduk dibangku SMP.

Tabel III-24. Perbandingan APK dan APM Berbagai Jenjang Pendidikan

Indikator	Tahun (%)	
	2001	2006
<b>Angka Partisipasi Kasar :</b>		
- SD/MI	113,78	105,86
- SMP/MTs	55,24	70,83
- SMA/MA	30,80	47,67
<b>Angka Partisipasi Murni :</b>		
- SD/MI	94,41	89,08
- SMP/MTs	38,24	55,42
- SMA/MA	22,67	36,46

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Gorontalo (2006)

Seiring dengan perbaikan kualitas pendidikan, pemerintah terus mengembangkan infrastruktur guna mendukung kinerja bidang pendidikan. Pada tahun 2001, jumlah gedung SD sebesar 839 buah meningkat menjadi 849 buah atau naik sebesar 1,19 % di tahun 2006. Untuk SMP tahun 2001 sebanyak 97 buah meningkat menjadi 178 buah di tahun 2006 atau naik 83,50 %. Sedangkan untuk SMA tahun 2001 baru 40 buah meningkat sebesar 85 di tahun 2006 menjadi 74 buah.

Tabel III-25. Perbandingan Infrastruktur Sekolah

Gedung Sekolah	Jumlah		Trend (%)
	2001	2006	
SD/MI	839	849	1,19
SMP/MTs	97	178	83,50
SMA/MA	40	74	85
Total	976	1.101	12,81

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Gorontalo (2006)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Program Pengembangan SDM oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 menunjukkan bahwa program Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) telah berhasil meningkatkan (1) kualitas dan kuantitas kelompok sasaran program, (2) tingkat ketersediaan silabus dan buku pegangan PBK dan (3) tingkat kesesuaian kegiatan PBK dengan pencapaian program.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok sasaran program ditunjukkan oleh meningkatkannya :

- 1) jumlah siswa yang telah mengikuti program PBK mencapai; SD 2.584 siswa, SMP 4.310 siswa dan SMA 4.324 siswa
- 2) jumlah guru yang mengimplementasikan PBK tahun 2005 berjumlah 167 guru atau meningkat 321 % dibanding tahun 2004 yang baru mencapai 50 guru.
- 3) jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan PBK tahun 2005 berjumlah 115 sekolah atau naik sebesar 230 % dari tahun 2004 yang berjumlah 50 sekolah.

Peningkatan kesesuaian silabus dan buku pegangan PBK ditunjukkan dengan meningkatnya :

- 1) jumlah silabus PBK tahun 2005 adalah 240 buah atau naik sebesar 200 % dibanding tahun 2004 sebanyak 120 buah.
- 2) jumlah buku pegangan guru tahun 2005 berjumlah 240 buah atau naik 185 % dari tahun 2004 sebanyak 130 buah.
- 3) jumlah buku pegangan murid tahun 2005 sebanyak 600 buah.

Peningkatan kesesuaian kegiatan PBK dengan pencapaian program terlihat dari relevansi PBK terhadap materi dan metode pembelajaran, diklat guru PBK, implementasi PBK, kompetensi dan kapabilitas serta sikap dan pola pikir yang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan hasil evaluasi yang

menunjukkan adanya kesesuaian persepsi yang mengarah pada pencapaian program dengan kualifikasi **SANGAT BAIK**.

Disamping itu juga berdasarkan hasil penelitian “Governance Assessment, Developing a Diagnostic Tool and Its Application for Governance Reform oleh Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Provinsi Gorontalo menempati posisi Pertama dalam hal akses warga miskin terhadap pelayanan pendidikan khususnya beasiswa di Indonesia.

Disamping peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, Provinsi Gorontalo juga mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur agar menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kebijakan yang ditempuh antara lain mengikutsertakan aparatur dalam berbagai diklat dan bimtek, pemberian beasiswa, workshop mind setting, strategic breakthrough dan standar kompetensi jabatan.

Tabel III-26. Perbandingan SDM Aparatur Provinsi Gorontalo

Uraian	Tahun (orang)		Trend (%)
	2002	2006	
Lemhanas	-	2	100
Diklatpim II	10	23	130
Diklatpim III	15	97	546,67
Diklatpim IV	-	160	100
Diklat Prajabatan	-	559	100
Diklat teknis & fungsional	47	275	485,11
Bantuan pendidikan	30	218	626,67
Bimtek penerapan nilai budaya kerja	-	87	100
Diklat Aparatur Kecamatan	-	90	100
Workshop Mind Setting	-	330	100
Workshop Strategic Breakthrougt	-	245	100
Workshop Standar Kompetensi Jabatan	-	65	100
Bimtek pengelolaan administrasi kepeg.	-	150	100
Bimtek tata cara penyelesaian kasus & usul ke Bapek	-	100	100
Praja STPDN	10	64	540
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>2.465</b>	<b>2.100,89</b>

Sumber : BKD Dan DIKLAT Prov. Gorontalo (2006)

## b. Kesehatan

Sebagai bagian dari program unggulan pengembangan SDM, pembangunan bidang kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas layanan dan infrastruktur yang dimiliki terus meningkat seiring dengan tingkat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Data menunjukkan jumlah sarana prasarana kesehatan Gorontalo pada tahun 2001 masih sangat minim. Hal ini tercermin dari jumlah rumah sakit baru berjumlah enam buah dengan kapasitas tempat tidur yang dimiliki sebanyak 365 bed.

Tabel III-27. Perbandingan Jumlah Rumah Sakit dan Kapasitas Tempat Tidur

Jenis Rumah Sakit	Jumlah		%	Tempat Tidur		%
	2001	2006		2001	2006	
1. Rumah Sakit Umum	2	5	300	263	362	37,64
2. Rumah Sakit Khusus	1	1	0	37	32	(13,51)
3. Rumah Sakit ABRI	1	1	0	25	20	(20)
4. Rumah Sakit Swasta	2	2	(50)	40	80	100
T o t a l	6	9	50	365	494	35,34

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo (2006)

Berdasarkan perkembangan data diatas terlihat jumlah rumah sakit meningkat sebesar 50 % dari enam buah tahun 2001 menjadi 9 rumah sakit di tahun 2006. Demikian halnya dengan kapasitas tempat tidur yang mengalami peningkatan sebesar 35,34 % dari 365 tempat tidur di tahun 2001 menjadi 494 di tahun 2006.

Sementara untuk jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling Darat dan Laut juga mengalami peningkatan. Dalam rangka pemenuhan layanan kesehatan masyarakat di Gorontalo, maka pada tahun 2006 jumlah Puskesmas meningkat sebesar 33,33 % dari 39 unit di tahun 2001 menjadi 52 unit. Demikian halnya dengan Pustu dan Puskesmas Keliling Darat dengan peningkatan masing-masing Pustu 6,64 % dan Puskesmas Keliling Darat 70,97 %.

Tabel III-28. Perbandingan Jumlah Sarana Kesehatan

Kabupaten/Kota	Tahun 2001			
	Puskesmas	Pustu	Puskesmas Darat	Puskesmas Laut
Kab. Gorontalo	22	126	17	2
Kab. Boalemo	11	53	8	-
Kota Gorontalo	6	32	6	-
Total	39	211	31	2
Tahun 2006				
Kab. Gorontalo	21	99	21	-
Kab. Boalemo	8	25	6	1
Kota Gorontalo	6	33	10	-
Kab. Pohuwato	9	29	9	1
Kab. Bone Bolango	8	33	7	-
Total	52	225	53	2
Kenaikan (%)	33,33	6,64	70,97	0,00

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo (2006)

Disamping penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, jumlah tenaga kesehatan di Gorontalo terus meningkat. Pada tahun 2001 jumlah dokter baru mencapai 70 dokter dengan spesifikasi umum 48 dokter, gigi 9 dokter dan spesialis 13 dokter. Sedangkan jumlah tenaga paramedis sebanyak 1.087 perawat yang terdiri atas 981 tenaga perawat dan 106 non perawat. Sementara di tahun 2006 jumlah tenaga kesehatan mencapai 183 dokter atau naik 161,43 %. Sedangkan untuk tenaga paramedis mengalami penurunan sebesar 5,15 % dengan jumlah tahun 2006 sebanyak 1.031 perawat. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah tenaga paramedis dikarenakan kebutuhan formasi struktural dinas kesehatan baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dimana paramedia yang semula merupakan tenaga fungsional berubah menjadi pejabat struktural.

Tabel III-29. Perbandingan Jumlah Tenaga Kesehatan

Kabupaten/Kota	Dokter			Tenaga Paramedis	
	Umum	Gigi	Spesialis	Perawatan	Non Perawatan
Kab. Gorontalo	19	3	12	576	53
Kab. Boalemo	13	2	-	63	19
Kota Gorontalo	16	4	1	342	34
Jumlah (2001)	48	9	13	981	106
Tahun 2006					
Kab. Gorontalo	33	5	7	306	70
Kab. Boalemo	15	2	1	91	24
Kota Gorontalo	59	6	14	237	65
Kab. Pohuwato	11	2	-	91	24
Kab. Bone Bolango	23	4	1	94	29
Jumlah (2006)	141	19	23	819	212
Prosentase	193,75	111,11	76,92	(16,51)	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo (2006)

Sejalan dengan peningkatan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo, sejumlah indikator kesehatan juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, angka harapan hidup baru mencapai 63 tahun meningkat menjadi 65 tahun di 2006. Angka kematian bayi tahun 2001 sebesar 23,50 bayi turun menjadi 18,70 bayi per 1.000 kelahiran. Demikian pula dengan angka kematian ibu melahirkan dari 326 menjadi 225 per 100.000 kelahiran. Dan balita gizi buruk turun dari 17,1 % menjadi 7,9 % dari jumlah balita di Gorontalo.

Tabel III-30. Perbandingan Indikator Kesehatan Gorontalo

Indikator	Tahun	
	2001	2006
Angka Harapan Hidup (tahun)	61,00	67,00
Angka Kematian Bayi (/1.000 kelahiran)	23,00	21,10
Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 kelahiran)	324,00	307,00
Balita Gizi Buruk (%)	17,90	8,10

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo (2006)

Kolaborasi kinerja bidang ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya merepresentasikan keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo membangun kinerja kelembagaan yang tinggi. Dalam waktu empat tahun telah terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia (HDI). Pada tahun 1999 saat masih bergabung dengan Sulawesi Utara HDI Gorontalo baru mencapai 63,3 untuk Kabupaten Gorontalo dan 66,7 untuk Kota Gorontalo, kemudian pada tahun 2002 naik menjadi 64,1 dan pada tahun 2004 tercatat HDI Gorontalo mencapai 65,39. Angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan HDI nasional sebesar 65,8.

Berbagai keberhasilan program pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan telah menjadi fokus penelitian Bank Dunia melalui kegiatan Gorontalo Millenium Development Goals (Gorontalo MDG) sebagai komponen kegiatan Gorontalo PEACH. Gorontalo merupakan daerah pertama di Indonesia untuk pengkajian tujuan pembangunan milenium (MDG).

Disamping itu berdasarkan hasil penelitian "Governance Assessment, Developing a Diagnostic Tool and Its Application for Governance Reform" oleh Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada tahun 2006, Gorontalo menempati posisi Ketiga setelah Bangka Belitung dan DIY dalam hal aksesibilitas warga miskin terhadap pelayanan kesehatan (Askeskin).

### **c. Tenaga Kerja**

Perkembangan jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja di Gorontalo menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tahun 2001 jumlah angkatan kerja mencapai 359.158 orang dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam lapangan kerja utama mencapai 287.841 orang atau 80,13 %. Meningkatnya aktivitas sektor-sektor strategis daerah turut mempengaruhi daya serap sektor terhadap tenaga kerja dimana pada tahun 2006, jumlah angkatan kerja yang terserap

pada lapangan kerja utama mencapai 351.778 orang dari total 398.162 angkatan kerja atau mencapai 88,35 %.

Tabel III-31. Perbandingan Angkatan Kerja dan Lapangan Kerja di Gorontalo

Indikator	Tahun		%
	2001	2006	
Angkatan Kerja	359.158	398.162*	10,86
Lapangan Kerja	287.841	351.778	22,21

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Koperasi Prov. Gorontalo (2006)

\* Data sementara sampai dengan Juni 2006

Daya serap tenaga kerja terbesar berada pada sektor pertanian. Pada tahun 2001 jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tercatat sebesar 56,78 % atau mencapai 203.930 orang. Sedangkan tahun 2006 jumlah penduduk yang bekerja mencapai 209.234 atau sebesar 52,55 %. Meski dari sisi prosentase mengalami penurunan namun dari sisi jumlah yang bekerja meningkat sebesar 2,60 %.

Tabel III-32. Perbandingan Prosentase Penduduk Bekerja Per Sektor

Lapangan Kerja (Sektor)	Persentase Penduduk	
	2001	2006
Pertanian	56,78	52,55
Pertambangan & galian	2,03	0,94
Industri	7,49	7,07
Listrik, gas, air minum dan pembangunan	2,96	2,61
Perdagangan, hotel & restoran	13,28	15,88
Angkutan	4,72	6,45
Bank & lembaga keu. Lainnya	0,93	0,87
Jasa-jasa	11,77	13,33
Lainnya	0,04	0,3

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Koperasi Prov. Gorontalo (2006)

#### d. Hukum, Kemasyarakatan Dan Agama

Hingga tahun 2006, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Gorontalo relatif stabil. Dari tahun 2001 hingga 2006 tidak pernah terjadi kasus pertikaian antar warga baik yang berhubungan dengan masalah antar etnis, wilayah maupun agama. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan, sejumlah kasus pelanggaran hukum menunjukkan kenaikan antara lain pidana umum sebesar 156,09 % dari 164 tahun 2001 menjadi 420 kasus di tahun 2006. Demikian halnya dengan kasus korupsi dan narkoba yang naik sebesar 100 % dari 1 kasus menjadi 2 kasus di tahun 2006. Sedangkan untuk kasus pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan sebesar 10,69 % dari 5.080 kasus tahun 2001 menjadi 4.537 kasus pada tahun 2006. Sementara untuk kasus perdata justru mengalami penurunan sebesar 33,85 % dari tahun 2001 sebanyak 65 kasus menjadi 43 kasus di tahun 2006.

Tabel III-33. Perbandingan Jumlah Pelanggaran Hukum yang dilaporkan

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus		Trend (%)
	2001	2006*	
Pidana Umum	164	420	156,09
Perdata	65	43	33,85
Korupsi	1	2	100
Narkoba	1	2	100
Lalu Lintas	5.080	4.537	(10,69)
Total	166	424	155,42

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo (2006)

\* Data hingga Desember 2005

Sementara jumlah penduduk menurut agama di Provinsi Gorontalo tahun 2001 dan 2006 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Penduduk beragama Islam tahun 2006 mencapai 903.710 jiwa atau naik sebesar 5,60 % dibanding tahun 2001 yang baru mencapai 853,094 jiwa. Untuk penduduk beragama Kristen Protestan mencapai 16.779 jiwa atau naik 30,45 % dari tahun 2001 yang baru sebesar 12.862 jiwa. Sedangkan

Jumlah penduduk beragama Kristen Katolik mengalami peningkatan sebesar 39,69 % dari 2.328 jiwa tahun 2001 menjadi 3.252 jiwa tahun 2006. Demikian halnya dengan penduduk beragama Hindu mencapai 4.539 tahun 2006 atau naik sebesar 49,41 % dari tahun 2001 yang baru mencapai 3.038 jiwa. Dan untuk penduduk yang beragama Budha tercatat mengalami peningkatan sebesar 36,17 % dari 1.620 jiwa di tahun 2001 menjadi 2.206 jiwa pada tahun 2006.

Tabel III-34. Perbandingan Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah Penduduk Tahun		Trend (%)
	2001	2006*	
Islam	853.094	903.710	5,60
Kristen Protestan	12.862	16.779	30,45
Kristen Katolik	2.328	3.252	39,69
Hindu	3.038	4.539	49,41
Budha	1.620	2.206	36,17

Sumber : Kanwil Depag Provinsi Gorontalo

\* Data sampai dengan Desember 2005

Kenaikan jumlah penduduk menurut agama di Gorontalo di ikuti pula oleh peningkatan jumlah sarana peribadatan. Pada tahun 2006 jumlah mesjid mencapai 1.612 buah atau naik sebesar 15,80 % dari 1.392 mesjid di tahun 2001 dan Mushallah meningkat sebesar 23,39 % dari 124 buah di tahun 2001 menjadi 153 buah pada tahun 2006. Sedangkan jumlah Gereja Protestan dari 94 di tahun 2001 menjadi 108 buah pada tahun 2006 atau meningkat 14,89 %. Demikian halnya dengan jumlah Gereja Katolik yang meningkat sebesar 40 % dari 15 gereja di tahun 2001 menjadi 21 gereja pada tahun 2006. Untuk Pura meningkat dari 3 buah di tahun 2001 menjadi 9 buah pada tahun 2006 atau meningkat sebesar 200 %. Dan terakhir untuk jumlah Vihara naik sebesar 33,33 % dari 3 buah tahun 2001 menjadi 4 buah di tahun 2006.

Seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh naiknya aktivitas ekonomi masyarakat Gorontalo, jumlah

penduduk muslim yang menunaikan ibadah haji juga meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2006 tercatat jumlah jemaah haji Gorontalo mencapai 806 jemaah atau meningkat sebesar 160 % jika dibandingkan dengan jumlah jemaah haji tahun 2001 yang baru mencapai 309 jemaah.

Tabel III-35. Perbandingan Jumlah Jemaah Haji

Tahun	Jumlah
2001	309
2006*	806
Kenaikan (%)	160,84

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

\* Data sampai dengan Desember 2005

Jumlah jemaah haji tertinggi terjadi pada tahun 2004 yang mencapai 916 jemaah. Faktor yang turut mempengaruhi peningkatan jumlah jemaah haji Gorontalo adalah kuota yang ditetapkan oleh Departemen Agama RI untuk setiap provinsi. Hal ini juga yang mengakibatkan jumlah jemaah haji tahun 2006 (Desember 2005) mengalami penurunan sebesar 13,65 % dibanding tahun 2004.

#### 4. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan media untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam konteks akses transportasi darat, laut dan udara. Dalam konteks ini, terlihat jelas geliat sektor transportasi menjadi tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi menjadi corong dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor produksi. Bahkan, ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, jaringan transportasi dan telekomunikasi yang memanjang dari ujung utara di Atinggola sampai ujung barat di Popayato menjadi pemicu pembagunan kawasan yang sangat efektif. Artinya, disparitas kesejahteraan antarkawasan juga dapat dieksplor lebih jauh melalui kesenjangan infrastruktur yang tersedia. Hal ini tidak dapat dipungkiri, dengan melihat fungsi utama infrastruktur transportasi yang berperan besar membuka isolasi wilayah. Sedang, telekomunikasi mendukung keterbukaan akan informasi masyarakat yang berujung pada pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

#### **a. Sumber Daya Air**

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di awal penyelenggaraan pembangunan Provinsi Gorontalo, salah satu kendala yang ditemui adalah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan pasokan air bersih masyarakat. Karena itu, pembangunan jaringan irigasi dan penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih optimal. Tahun tahun 2001, terdapat 26 daerah irigasi yang tersebar 5 (lima) daerah irigasi (Kabupaten Gorontalo memiliki daerah irigasi terbanyak atau 15 buah) dengan luas areal potensi pelayanan sebesar 66.111, 54 Ha. Sampai dengan tahun 2006, terjadi peningkatan 23,1 % (76,540, 33 Ha) cakupan potensi pelayanan irigasi atau terjadi penambahan 6 daerah

irigasi. Peningkatan cakupan layanan irigasi in, secara signifikan menjadi salah satu kontributor peningkatan produksi dan produktifitas pertanian beberapa tahun belakangan.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan air sektor produksi di atas, sepanjang tahun 2001-2006 juga telah diupayakan pembangunan fasilitas dan perluasan cakupan sumber daya air. Sampai dengan tahun 2006, telah terbangun 17 unit sumur dalam dan 45 unit sumur gali. Lebih lanjut, cakupun layanan PATM dan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) mengalami peningkatan cukup drastis masing-masing sebesar 1.200 Ha dan 531 Ha.

Tabel III-36. Perbandingan Layanan PATM dan JIAT

Uraian	Tahun		Trend (%)
	2001	2006	
PATM (Ha)	0	1200	100
JIAT (Ha)	0	531	100
Sumur Gali (Unit)	0	45	100
Sumur Dalam (Unit)	0	17	100

Sumber : Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo, 2006

Upaya lain dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan layanan air bersih bagi masyarakat. Untuk melihat sejauhmana layanan air bersih tersebut, dapat ditelusuri melalui jumlah produksi PDAM. Walaupun jumlah produksi ini tidak mencerminkan layanan air bersih dengan utuh, namun secara sederhana realitas pasokan PDAM menjadi satu-satunya indikator yang dapat digunakan. Pada tahun 2001, dengan jumlah produksi 550 liter/detik, PDAM telah dapat menyalurkan 388.000 meterkubik kepada 194.000 pelanggannya. Setelah 5 tahun berproduksi, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam hal produksi sebesar 958 meter/detik atau naik 74,18 %. Kenaikan yang sama terjadi dalam jumlah pasokan maupun jumlah pelanggan masing-masing sebesar 42,53 % atau 553.000 meter/kubik dan 276.000 orang.

Tabel III-37. Perbandingan kapasitas produksi PDAM.

Uraian	Tahun		Trend (%)
	2001	2006	
Produksi (Lt/Det)	550	958	74,18
Jlh yg disalurkan (M/Kubik)	388.000	553.000	42,53
Tdk tersalur (M/Kubik)	155.200	221.200	42,53
Pelanggan (Org)	194.000	276.500	42,53

Sumber : PDAM Kota Gorontalo, 2006

## b. Transportasi

### Prasarana Jalan

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Transportasi jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah. Oleh sebab itu, ketersediaan prasarana jalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah tanah air merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi.

Tabel III-38. Kondisi Jalan.

Jenis Jalan	Kondisi Tahun 2001 (Km)			Jumlah
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Jalan Nasional	401,76	91,06	58,21	551,03
Jalan Provinsi	66,93	100,4	50,69	218,02
Total	468,6	191,46	108,9	769,05
Kondisi Tahun 2006 (Km)				
Jalan Nasional	440,58	130,11	45,55	616,84
Jalan Provinsi	136,46	108,85	222,91	468,22
Total	577,04	238,96	268,46	1.084,46
Prosentase	23,12 %	24,81 %	146,52	41,01

Sumber : Dinas PU/Kimpraswil Provinsi Gorontalo, 2006

Sejak tahun 2001, di Provinsi Gorontalo telah terbangun 769,05 km jalan, terdiri dari jalan nasional 551,05 km dan 218,02 km jalan provinsi. Sepanjang 5 tahun berjalan pembangunan daerah, baik jalan provinsi maupun nasional terus mengalami penurunan. Beberapa sebab utama adalah kualitas konstruksi jalan yang belum optimal, pembebanan berlebih (*excessive over loading*), kondisi lapis permukaan jalan, bencana alam seperti longsor, banjir, dan gempa bumi, serta menurunnya kemampuan pembiayaan menyebabkan berkurangnya secara drastis biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan pada tahun 2006, dari total panjang jalan Provinsi dan Nasional 1.084 km, kondisi jalan yang rusak berat mencapai 24,75 persen (atau 268,46 km), kondisi rusak mencapai 22,03 persen (atau 238,96 km) dan kondisi baik mencapai 53,24 persen (atau 577,04 km).

### **Prasarana Bandara**

Transportasi udara memiliki keunggulan dibanding moda transportasi lainnya. Pertimbangannya adalah kecepatan transportasi ini, menjadikan masyarakat lebih *prefer* untuk menggunakan alat transportasi udara. Melihat fungsinya utamanya tersebut, tidak heran kapasitas bandara menjadi salah satu pertimbangan orang (swasta maupun investor lainnya) melakukan investasi di daerah.

Pada tahun 2001, Bandara Djalaludin hanya bisa didarati oleh pesawat berbadan kecil sejenis Fokker, karena itu, jumlah penumpang yang mendarati Bandara Djalaluddin juga masih sangat kecil. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi dan fasilitas yang ada belum memenuhi syarat untuk didarati pesawat berbadan lebar. Hal ini tidak dipungkiri karena pada tahun tersebut run way yang terbangun baru 1850 x 30 meter. Begitu juga dengan turning area, apron serta tempat parkir maupun gedung VIP masih jauh dari “nilai” layak.

Seiring perkembangan dan urgensi bandara bagi Provinsi Gorontalo, wajah Bandara Djalaluddin terus dipoles sehingga menjadi

lebih layak dan aman digunakan dalam kancah penerbangan nasional. Sampai dengan tahun 2006, panjang run way telah bertambah 400 meter, luas apron bertambah 107 meter, kemudian ruang VIP telah diperluas sebesar 233 m<sup>2</sup>. Bahkan, Gedung Kargo telah dibangun dengan seluas 220 m<sup>2</sup>, sebagai sarana penunjang bandara selain tempat parkir.

Tabel III-39. Kondisi Fasilitas Bandara Djalaluddin

Fasilitas	Volume 2001		Trend (%)
	2001	2006	
Runway	1.850 x 30 M	2.250 x 30 M	22
Turning Area (RW 09)	2 x 1200 M <sup>2</sup>	3 x 1200 M <sup>2</sup>	50
Air Strip	1970 x 150 M	2.370 x 150 M	1100
Apron	124 x 80 M	231,5 x 80 M	87
VIP Room	137 M <sup>2</sup>	370 M <sup>2</sup>	170
Gudang Kargo	-	220 M <sup>2</sup>	220
Parkir	300 M <sup>2</sup>	3.200 M <sup>2</sup>	967
Jumlah Maskapai (aktif)	1 Buah	4 Buah	300

Sumber : Dinas Perhubungan Parpostel, 2006

Beberapa perubahan dan penambahan fasilitas Bandara Djalaluddin di atas telah memberikan makna positif dalam hal peningkatan jumlah penumpang maupun barang kargo yang masuk dan keluar di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Tabel III-40. Jumlah penumpang melalui Bandara Djalaludin

Kategori	Tahun		Trend (%)
	2001	2006	
Berangkat	4.626	74.794	1.517
Tiba	3.514	71.730	1.941
Transit	3.599	412	-88,55
Total	11.739	146.936	

Sumber : Dinas Perhubungan dan Parpostel, 2006

### Prasarana Transportasi Laut

Selain pengembangan transportasi udara dan jalan (darat), pemerintah daerah terus mengupayakan pula pengembangan sektor transportasi laut. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan

kapasitas pelabuhan baik Pelabuhan Gorontalo, Kwandang dan Pelabuhan Anggrek, antara lain, peningkatan luas dermaga. Dermaga pelabuhan Kwandang, dengan luas 37 x 6 meter telah diperluas menjadi 64 x 6 meter, dan diikuti dengan pembangunan dermaga pelabuhan Anggrek dari 120 x 12 meter diperluas menjadi 153 x 12 meter.

Perluasan serta penambahan beberapa fasilitas pada Pelabuhan Gorontalo, Kwandang dan Anggrek secara signifikan memberi dampak pada penambahan jumlah kapal masuk dan keluar pada ketiga pelabuhan tersebut. Tahun 2001 jumlah kunjungan kapal di Pelabuhan Gorontalo mencapai 733, sedang pada pertengahan tahun 2006 telah mencapai 64 kunjungan kapal. Untuk pelabuhan Kwandang dan Anggrek terjadi lonjakan arus kedatangan kapal yang cukup tinggi, masing-masing 262 dan 135 buah kapal.

Tabel III-41. Pelabuhan Laut

Fasilitas	Kondisi Tahun 2001		
	Pel. Gorontalo	Pel. Kwandang	Pel. Anggrek
Dermaga	I. 60 m x 10,5 m II. 120 m x 10 m	37 x 6 m	120 m x 12 m
Menara suar	1 unit	2 unit	-
Gudang penumpukan	I. 560 m <sup>2</sup> II. 1.000 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
Area parkir	-	-	1.546 m <sup>2</sup>
Jalan Masuk	0,3 km	0,1 km	0,297 km
Kapal masuk/ keluar	733/733	46/46	-
Kondisi Tahun 2006			
Dermaga	I. 60m x 10,5 m II. 120m x 10 m	64 x 6 M	153x 12 M
Menara suar	1 unit	2 Unit	-
Gudang penumpukan	a. 560 m <sup>2</sup> b. 1.000 m <sup>2</sup>	420 M	30 M <sup>2</sup>
Area parkir		-	1.546 m <sup>2</sup>
Jalan masuk	0,3 km	0,1 km	0,297 km
Kapal masuk/ keluar	64/54	262	135/135

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo (2006)

Sangat disadari bahwa transportasi laut kini tidak lagi menjadi trend dimasyarakat dibanding 5 tahun belakangan. Sebagai salah satu alternatif pilihan alat transportasi, diharapkan mobilitas masyarakat akan semakin lancar, terutama untuk mencukung arus barang perniagaan antar pulau.

### c. Pos dan Telekomunikasi

Salah satu perubahan penting yang terjadi satu dekade terakhir adalah berkembang dan bergesernya masyarakat industri kepada masyarakat informasi. Pergeseran tersebut didorong oleh akselerasi teknologi dan iptek yang sangat cepat. Pada kondisi ini, masyarakat semakin menghargai dan mengakui peran informasi dalam membangun masyarakat mandiri.

Kemampuan masyarakat Gorontalo dapat dilihat melalui jumlah pelanggan telepon dan prasarana yang tersedia dan memberikan layanan informasi. Pada tahun 2001, Kantor Telkom yang ada di Gorontalo hanya 3 buah, terdapat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, sampai pertengahan tahun 2006 jumlah kantor Telkom menjadi 5 unit. Jumlah pelanggan juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 12.980 orang menjadi 16.113 orang atau naik 24, 14 %.

Tabel III-42. Jumlah Fasilitas dan Pelanggan Telkom

Kategori	Tahun		Trend
	2001	2006	
Kantor Telkom	3	5	66,67
Jumlah Pelanggan	12,980	16,113	24,14
Pasang Baru	-	-	-

Sumber : Kantor Telkom Gorontalo, 2006

Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan pos juga semakin meningkat, ditandai dengan peningkatan kantor pos dari 14 unit tahun

2001 menjadi 16 unit di tahun 2006. Melalui penambahan infrastruktur pos tersebut, diharapkan jangkauan layanan menjadi semakin luas.

Melihat realitas di atas, memang terjadi lonjakan cukup besar dalam proses mendapatkan dan mengakses informasi melalui berbagai media. Namun, kesenjangan akses informasi yang cepat antar kota dan desa masih cukup terasa. Ditandai dengan kurang familiarnya akses digitasi informasi melalui media selular dan internet masyarakat pedesaan dibanding komunitas di perkotaan. Untuk itu, perlu segera dilakukan berbagai perbaikan dalam format fasilitasi dan membuka akses informasi yang lebih luas sampai pada level perdesaan.

#### **d. Ketenagalistrikan**

Sangat terasa bahwa energi listrik memiliki posisi penting dalam konteks pembangunan daerah. Tidak terbayangkan, pasokan listrik dihentikan sehari saja, seluruh aktifitas dengan sendirinya lumpuh total. Hal ini sangat disadari oleh Pemda Gorontalo, apalagi melihat pasokan listrik yang sangat terbatas di Gorontalo.

Sampai dengan tahun 2001, terjadi peningkatan produksi listrik 15,07 % per tahun dengan total produksi 82.337.939 KWH. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya konsumsi listrik rumah tangga dan kegiatan investasi. Disisi lain, jumlah pasokan listrik melalui PT. PLN Gorontalo tahun 2001, hanya mampu menaikkan produksi sebesar 14,53 persen.

Melihat realitas tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan PT. PLN terus mengupayakan peningkatan pasokan energi listrik melalui penambahan mesin pembangkit listrik. Sehingga diharapkan kolaborasi ini dapat memenuhi permintaan konsumsi listrik daerah. Sampai tahun 2005, besarnya konsumsi listrik telah mencapai 108.509.342 KWH atau naik 31,79 %. Peningkatan konsumsi listrik

terbesar disisi permintaan rumah tangga, diikuti oleh sektor bisnis, industri dan publik.

Diharapkan, penanganan dan eksplorasi energi listrik ditangani dengan serius, karena sangat disadari bahwa permintaan energi serta pasokan yang ada berjalan tidak seiring. Artinya, permintaan pasokan energi akan semakin energi seiring dengan perkembangan sektor jasa dan industri.

#### **D. Pembinaan Dan Pengawasan.**

Badan Pengawasan Provinsi Gorontalo sebagai lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Gorontalo membantu Pimpinan Daerah dalam merumuskan kebijakan Pengawasan dan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (*Good Governance*).

Langkah dan upaya pembinaan dan pengawasan dalam rangka memantapkan efektivitas dan efisiensi pemerintah yang desentralistik terhadap para pemimpin/pejabat satuan kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada perbaikan kinerja dan kredibilitas para pemimpin atau pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun agar tidak melakukan penyimpangan dan penyelewengan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelayanan publik antara lain dilakukan melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan limpahan.

Capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Provinsi Gorontalo melalui indikator sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai fungsi-fungsi manajemen yang mengutamakan pemeriksaan prefentif menunjukan prestasi yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan menurunnya

presentase temuan hasil pemeriksaan APBD yang diperiksa secara rutin pertahun yaitu tahun 2002 temuan hasil pemeriksaan hanya 0,15% dari total APBD tahun tersebut, tahun 2003 menjadi 0,19%, tahun 2004 menurun menjadi 0,13%, tahun 2005 menjadi 0,06%, sedangkan pada tahun 2006 diperkirakan akan menurun menjadi 0,05%.

Hasil pemeriksaan Provinsi dan Kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun, secara bertahap realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik temuan administrasi sebesar 52,13% dan temuan kerugian Negara/Daerah sebesar 53,61%, yang berarti rata-rata 50%.

Sedangkan hasil temuan pemeriksaan menyangkut Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor.30 Tahun 1980, direkomendasikan pengenaan disiplin 91 orang PNS yaitu tahun 2003 sebanyak 21 Orang, tahun 2004 sebanyak 52 orang dan tahun 2005 sebanyak 18 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2005 meningkat 65,38%.

Terhadap pengaduan masyarakat selama 5 (lima) tahun sebanyak 28 kasus, Badan Pengawas Provinsi Gorontalo telah melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan jumlah surat pengaduan yang diterima.